



SALINAN

GOVERNOR SULAWESI UTARA  
PERATURAN GOVERNOR SULAWESI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu rencana aksi pangan dan gizi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan gizi, Gubernur mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4421) sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Sulawesi Utara;
5. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan di Sulawesi Utara;
6. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026.

### Pasal 2

- (1) RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) Selain sebagai pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi sebagaimana ayat (1), RAD-PG juga menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi daerah sekaligus menjadi instrumen sinergi Perangkat Daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan gizi.

### Pasal 3

- (1) RAD-PG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Analisis Situasi;
  - c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
  - d. BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi;
  - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 1 Agustus 2023

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 1 Agustus 2023

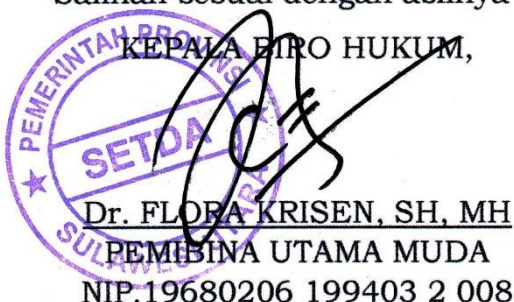
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ttd

**STEVE H. A. KEPEL**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH  
PEMIBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680206 199403 2 008

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
(RAD-PG)  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2023-2026**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : 7 TAHUN 2023  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023  
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2023-2026

---

### **Kata Pengantar**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Sulawesi Utara 2023-2026 merupakan kelanjutan dokumen RAD-PG sebelumnya yang berisi aksi penajaman kegiatan existing dan operasionalisasi Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk percepatan pencapaian RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan tujuan kedua dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disamping itu pelaksanaan RAD-PG menjadi bagian penting dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Rancangan RAD-PG ini disusun dengan mempertimbangkan respons pangan dan gizi dalam situasi kegawatdaruratan (termasuk pandemi COVID-19) serta penguatan dimensi gender. Selama pandemi COVID-19 ketahanan pangan dan gizi negara diuji. Jatuhnya perdagangan barang dan jasa, hilangnya pekerjaan dan penghasilan, serta turunnya produk dalam negeri mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian negara kita. Pandemi ini telah memicu krisis malnutrisi global yang korban utamanya masyarakat di daerah khususnya perempuan dan anak-anak. Hanya dalam beberapa bulan, COVID-19 telah merusak kemajuan puluhan tahun upaya pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Meskipun saat ini akses memperoleh vaksin semakin mudah, virus ini masih berpotensi berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan dan sosial-ekonomi, dan tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan dan gizi di daerah kita. Oleh karena itu untuk memastikan terjaganya ketahanan pangan dan gizi saat situasi darurat sekalipun, diperlukan strategi dan aksi multisektor yang tersusun dalam suatu rencana aksi daerah.

RAD-PG ini merefleksikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pencapaian target pembangunan ketahanan pangan dan gizi di tengah

masa pemulihan akibat Covid-19, dimana komitmen tersebut dijabarkan dalam empat tujuan strategi pangan dan gizi (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan), dan masing-masing tujuan strategi ini memiliki strategi dan aksi yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dan tentunya didukung dengan pengalokasian anggaran. RAD-PG ini selain berfungsi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan, juga sebagai instrumen daerah dalam melakukan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tataran provinsi maupun kabupaten dan kota.

Diharapkan RAD-PG ini segera ditindaklanjuti dalam kegiatan nyata di seluruh instansi provinsi maupun kabupaten dan kota. Diharapkan semua pihak berperan meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang kuat untuk menciptakan masyarakat Sulawesi Utara yang sehat dan cerdas.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan, membahas, memberikan pemikiran, dan kerja kerasnya dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 ini. Sulut maju dan sejahtera, Indonesia maju.

Daftar Isi

Kata Pengantar .....ii

Daftar Tabel ..... v

Daftar Gambar.....vi

Daftar Singkatan .....vii

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah..... 4

    C. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah ..... 5

    D. Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ..... 9

**BAB II ANALISIS SITUASI..... 11**

    A. Capaian ..... 11

    B. Tantangan.....23

**BAB III RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI .....25**

    A. Tujuan dan Sasaran .....25

    B. Ruang Lingkup.....26

    C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.....27

**BAB IV PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI.....33**

    A. Strategi dan Aksi .....33

    B. Pengorganisasian.....37

    C. Peran Sektor Non-Pemerintah.....44

    D. Pembiayaan.....45

**BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....47**

    A. Pemantauan RAD-PG.....47

    B. Evaluasi RAD-PG.....51

    C. Pelaporan RAD-PG .....51

**BAB VI PENUTUP.....53**

**BAB VII MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023-2026.....55**

**BAB VIII MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH ..... 138**

**LAMPIRAN : EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN STUNTING SULAWESI UTARA.....148**



Daftar Tabel

Tabel 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis ..... 11

Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi..... 12

Tabel 3. Produksi Perikanan ..... 12

Tabel 4. Ketersediaan Daging..... 13

Tabel 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ..... 14

Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan ..... 15

Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan Indikator  
Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar  
(*Stunting*) ..... 16

Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin ..... 17

Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara..... 18

Tabel 10. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi  
dalam RPJMN 2020 -2024 ..... 25

Tabel 11. Perbedaan Konsep Penyusunan RAD-PG Provinsi  
Sulawesi Utara 2023-2026 ..... 28

Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG..... 49

Tabel 13. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut  
Penyelenggaraan RAD-PG ..... 50

**Daftar Gambar**

Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan..... 3

Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026..... 4

Gambar 3. Kerangka Pikir RAD PG 2023-2026..... 36

Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi..... 52

## Daftar Singkatan

AGB	:	Anemia Gizi Besi
AKE	:	Angka Kecukupan Energi
AKP	:	Angka Kecukupan Protein
ASI	:	Air Susu Ibu
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPNT	:	Bantuan Pangan Non Tunai
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
B2SA	:	Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
B/RUV	:	Baited Remote Underwater Vehicle
CB-MPA	:	Capacity Building for Marine Protected Area
COVID-19	:	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
E-PPGBM	:	Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FIES	:	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
GAKI	:	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
HPK	:	Hari Pertama Kehidupan
IFPRI	:	<i>International Food Policy Research Institute</i>
IQ	:	<i>Intelligence Quotient</i>
KEK	:	Kurang Energi Kronik
Kkal	:	Kilo Kalori
KPBU	:	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KVA	:	Kekurangan Vitamin A
MP-ASI	:	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
MT	:	Musim Tanam
MUIC	:	<i>Median Urinary Iodine Concentration</i>
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Perpres	:	Peraturan Presiden
PMT	:	Pemberian Makanan Tambahan
PoU	:	<i>Prevalence of Undernourishment</i>
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Pola Pangan Harapan
PPL	:	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPRG	:	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUG	:	Pengarusutamaan Gender
RAD-PG	:	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	:	Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTF	:	<i>Ready to Use Therapeutic Food</i>
RZWP3K	:	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDG(s)	:	<i>Sustainable Development Goal(s)</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SEANUTS	:	<i>South-East Asian Nutrition Survey</i>
SEB	:	Surat Edaran Bersama
SKPG	:	Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi
TJSL	:	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	:	<i>United Nations</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu indikasi berhasilnya pembangunan suatu bangsa adalah tersedianya sumberdaya manusia berkualitas, yaitu sumberdaya manusia yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Keberhasilan dalam mencapai hal tersebut sangat ditentukan dengan status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi serta ketersediaan asupan pangan tersebut. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan sebuah investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengaturan tentang pangan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Pangan dan gizi merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya (Nafsiah Mboy, 2012). <sup>1</sup>

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya diupayakan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial guna tercapainya status gizi masyarakat yang optimal melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan

---

<sup>1</sup> <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20121121/316359/ketahanan-pangan-dan-perbaikan-gizi-merupakan-suatu-kesatuan/>

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

sampai anak berusia dua tahun. Berikut adalah dampak status gizi terhadap kualitas SDM.<sup>3</sup>

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia.
2. Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen.
3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi.
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*). IQ anak *stunting* rata-rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah.
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

Gerakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam lima tahun ke depan. Visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, yang tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dirumuskan pada Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. “Peningkatan

---

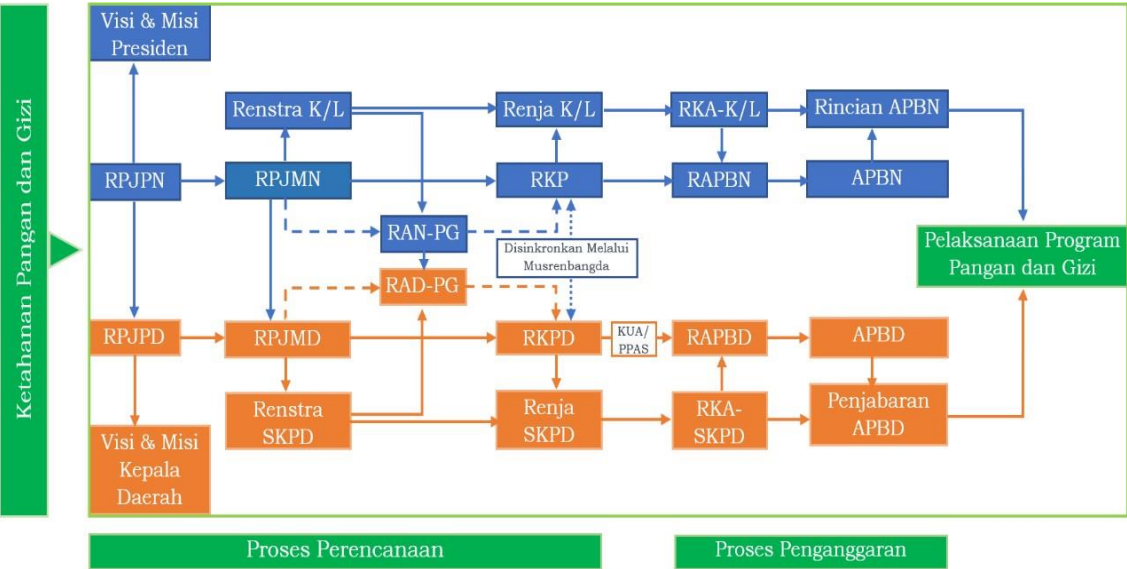
<sup>3</sup> Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024

Kualitas Manusia Sulawesi Utara” dan “Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” merupakan dua misi yang menempatkan pembangunan ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pada misi “Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara” yang mengandung pengertian bahwa kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat, upaya pada sektor kesehatan adalah percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan aksi konvergensi penanganan *stunting* di Sulawesi Utara. Misi selanjutnya yaitu “Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” memiliki tujuan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini terlihat pada kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Utara.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

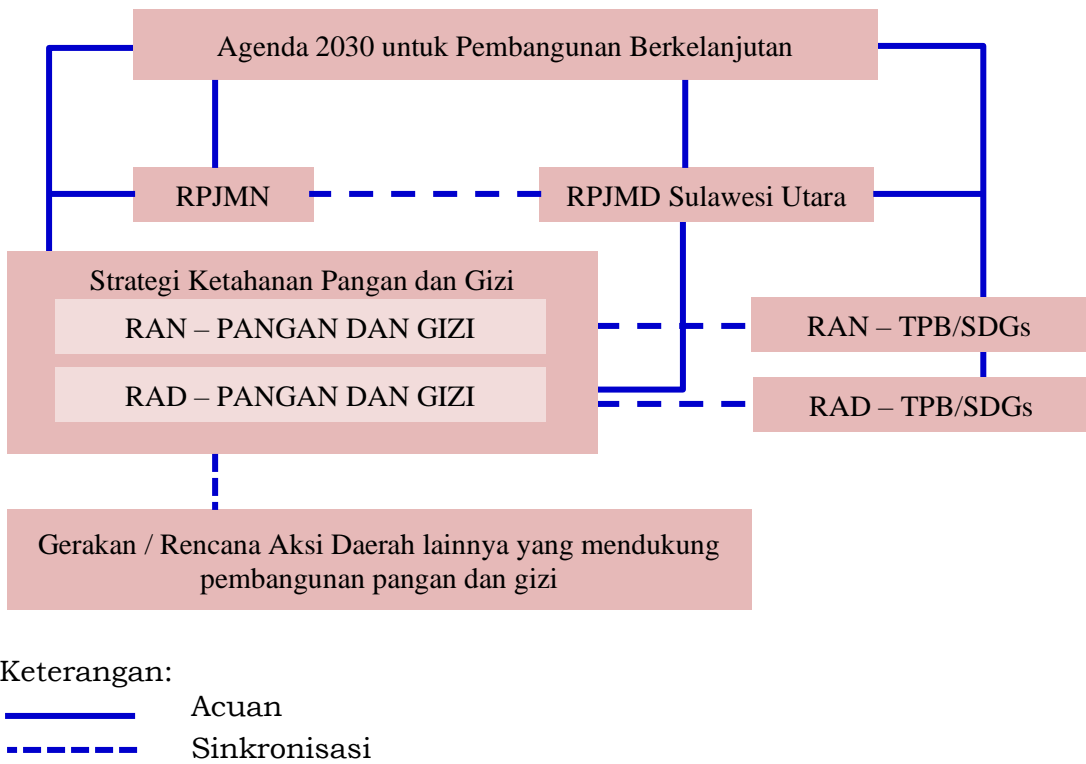
**Gambar 1. Integrasi Pembangunan Pangan dan Gizi dalam Perencanaan Pembangunan**



**B. Kedudukan RAD PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah**

Kedudukan RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs yang pelaksanaannya sejalan dengan gerakan nasional atau rencana aksi lain daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.

**Gambar 2. Posisi RAD-PG dalam mendukung tercapainya tujuan RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026**



Arah dan kebijakan pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara mengacu pada RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, diuraikan pada Misi kedua Pembangunan Sulawesi Utara, yaitu “Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa” dengan tujuan “Mempertahankan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Strategi untuk mencapai misi tersebut adalah: Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Kebijakan pembangunan pangan dan gizi, dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
  - o Program ini diarahkan untuk Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
  - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Cadangan Pangan
- b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
  - o Program ini diarahkan untuk Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
  - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan
- c. Program penanganan kerawanan pangan
  - o Program ini diarahkan untuk Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
  - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.
- d. Program pengawasan keamanan pangan
  - o Program ini diarahkan untuk Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - o Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase pangan segar asal tumbuhan yang sesuai persyaratan mutu dan keamanan pangan.

### **C. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pangan dan Gizi Pusat dan Daerah**

RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Olly Dondokambey, SE sebagai Gubernur dan Drs. Steven O.E. Kandouw sebagai Wakil Gubernur Periode 2021-2026 dengan visi “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”.



Visi tersebut memiliki tiga kata dan/atau kalimat kunci yaitu; Maju, Sejahtera, dan Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Pembangunan pangan dan gizi berada dalam aktualisasi pokok visi “Maju” khususnya kemampuan untuk menjamin pemberdayaan pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah; dan pokok visi “Sejahtera” khususnya kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya, visi ini diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara; 2. Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa; 3. Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas; 4. Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan; 5. Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah. Visi dan Misi Sulawesi Utara 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terejawantahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Perbaikan ekonomi yang membaik saat ini akan berkontribusi dalam peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Di tengah upaya mengatasi persoalan-persoalan lama terkait ketahanan pangan dan gizi, Indonesia kini menghadapi krisis baru yang dipicu oleh pandemi Coronavirus Disease 2019 (*COVID-19*). Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang lebih baik agar Indonesia mampu mencapai Agenda 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan memberantas kelaparan dan mengatasi malnutrisi, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara inklusif dan berkelanjutan paling lambat pada 2030.

Prioritas nasional terkait peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
- b. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
- c. Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan serta kepastian pasar;
- d. Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan air irigasi;
- e. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Prioritas nasional terkait percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi:

- a. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- c. Percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- d. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
- e. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
- f. Penguatan sistem surveilans gizi;
- g. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- h. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Utara periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD terkait secara langsung dan tidak langsung dengan pembangunan pangan dan gizi adalah:

- a. Pemulihan ekonomi dan Reformasi sosial dampak Pandemi *COVID-19*.
- b. Pembangunan konektivitas (menunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, serta dukungan fasilitas pertunjukan untuk seni, budaya dan olahraga).
- c. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpuni.
- d. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama untuk menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik.
- e. Melanjutkan dan meningkatkan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang terbukti efektif dan berhasil.
- f. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi role model nasional, serta dukungan bagi UMKM, ekonomi kreatif, pelaku usaha dan sektor riil.
- g. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan multiplier effect dan lapangan kerja yang luas. (KEK Industri Bitung, KEK Pariwisata Likupang, dan Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG)).
- h. Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah di tiap Kabupaten Kota, serta peningkatan kapasitas tenaga medis.
- i. Iklim investasi dan usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi dan sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- j. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar Sulut lebih maju sebagai *smart province*.

Sementara itu, telah ditetapkan empat aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan utama RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dan RAN PG 2021-2024, serta panduan dalam penyusunan RAD-PG Sulawesi Utara 2023-2026 yaitu:

- a. Pembangunan berkelanjutan – pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan,

dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

- b. Pengarusutamaan gender – mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
- c. Media sosial dan budaya – internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
- d. Transformasi digital – mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

## **D. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi**

Sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP 124/M.PPN/HK/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
16. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

**BAB II**  
**ANALISIS SITUASI**

**A. Capaian**

**Bidang Pangan**

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan strategis di Sulawesi Utara mengalami dampak dari pandemi *COVID-19*. Sebelum wabah *COVID-19* ketersediaan pangan strategis mengalami kenaikan. Tabel 1 menunjukkan ketersediaan komoditas beras selama tahun 2016-2020 mencapai 402.722 ton pada tahun 2017. Meskipun mengalami penurunan menjadi 345.051 ton di tahun 2018, jumlah ketersediaan beras ini masih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan beras di tahun 2016 sebesar 329.871 ton. Ketersediaan jagung juga mengalami kenaikan yang luar biasa, sebelum *COVID-19*, dari 135.471 ton di tahun 2016 menjadi 307.961 ton di tahun 2018. Sementara itu, jumlah ketersediaan kedelai berada di atas 10.000-an ton sebelum *COVID-19*. Namun demikian, ketersediaan pangan strategis mengalami penurunan setelah pandemi *COVID-19*. Ketersediaan beras menurun menjadi 339.930 ton di tahun 2019 dan 298.376 ton di tahun 2020. Demikian juga dengan ketersediaan kedelai yang jatuh menjadi 2.969 ton dan 3.000 ton di tahun 2019 dan 2020. Hanya jagung yang terus mengalami kenaikan jumlah ketersediaan meskipun di masa pandemi *COVID-19*. Di tahun 2020 ketersediaan jagung mencapai jumlah tertinggi selama 2016-2020, yaitu sebesar 351.228 ton.

**Tabel 1. Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis**

Jenis Pangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beras (Ton)	329.871	402.722	345.051	339.930	298.376
Jagung (Ton)	135.471	105.929	307.961	323.838	351.228
Kedelai (Ton)	15.697	11.543	13.687	2.969	3.000

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Sementara itu, persentase kebutuhan benih padi per tahun mengalami peningkatan. Tabel 2 menunjukkan pada tahun 2017 persentase kebutuhan padi sekitar 53 persen naik menjadi 80 persen pada tahun 2021. Meskipun

demikian, terjadi penurunan sasaran tanam, kebutuhan benih dan penyediaan benih bermutu sejak pandemi *COVID-19* pada tahun 2019. Pada tahun 2021, sasaran tanam menjadi 128.862 Ha, kebutuhan benih 3.221.550 kg, dan penyediaan benih bermutu hanya sebesar 2.577.240 kg.

**Tabel 2. Sasaran Kebutuhan Benih Padi**

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran Tanam (Ha)	169.094	216.193	212.852	140.130	128.862
Kebutuhan Benih (Kg)	4.227.350	5.404.825	5.321.300	3.503.250	3.221.550
Penyediaan Benih Bermutu (Kg)	2.240.496	3.080.750	3.405.632	2.452.275	2.577.240
Persentase Kebutuhan per Tahun	53	57	64	70	80

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut

Produksi perikanan budidaya mengalami lebih besar dampak pandemi *COVID-19* dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Tabel 3 menunjukkan produksi perikanan budidaya turun tajam dari 569.502 ton pada tahun 2019, menjadi 371.043 ton pada tahun 2020. Sedangkan produksi perikaan tangkap turun dari 384.300 ton pada tahun 2019, menjadi 342.142 ton pada tahun 2020. Meskipun demikian, produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan tajam pada tahun 2021 yaitu sebesar 575.000 ton. Lebih lanjut lagi, konsumsi ikan menurun pada tahun 2021 menjadi 61.5 kg/kap/tahun, meskipun terdapat kenaikan selama 2017-2020.

**Tabel 3. Produksi Perikanan**

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Produksi perikanan tangkap (ton)	358.678	382.005	384.300	342.142	405.422
Produksi perikanan budidaya (ton)	459.514	488.247	569.502	371.043	575.000
Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	58.88	60.08	60,13	62,67	61,5

\*Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. III.13

Seperti halnya dengan pangan pertanian, pangan daging juga mengalami dampak dari pandemi *COVID-19*. Tabel 4 menunjukkan kenaikan

jumlah ketersediaan daging sapi potong, ayam buras dan babi selama periode 2017-2019. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah ketersediaan daging ini mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi *COVID-19*. Daging sapi potong turun dari 3.693.673 kg di tahun 2019 menjadi 3.484.195 kg di tahun 2020; daging ayam buras turun dari 2.791.351 kg di tahun 2019 menjadi 2.771.768 kg di tahun 2020; daging babi turun sebesar 1.657.935 kg dari tahun 2019 sampai 2020. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2021 mulai terjadi kenaikan ketersediaan daging ayam buras sebesar 2.946.089 kg dan daging babi sebesar 26.742.064 kg, meskipun daging sapi potong masih mengalami penurunan menjadi 3.103.440 kg.

**Tabel 4. Ketersediaan Daging**

Jenis Ternak	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	3.496.608	3.518.331	3.693.673	3.484.195	3.103.440
Ayam Buras	2.612.217	2.636.413	2.791.351	2.771.768	2.946.089
Babi	23.534.900	24.827.503	25.112.902	23.454.967	26.742.064
Telur Ayam*	21.422,70	14.267,04	26.587,86	32.996,22	28.608,67

Sumber: Distanak Provinsi Sulut 2022 dan \*BPS

Ketersediaan pangan di Sulawesi Utara juga didukung dengan adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Luas lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Sulawesi Utara 2014 – 2034 adalah sebesar 107.361 Ha. Lahan pertanian pangan ini terbagi dua jenis yaitu lahan sawah existing sebesar 52.236 Ha, dan lahan sawah cadangan sebesar 55.125 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 81). Tabel 5 menunjukkan lahan pertanian pangan di Sulawesi Utara ini sebagian besar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 40.912,3 Ha atau sekitar 38,11 persen, sedangkan di daerah kabupaten kepulauan Sangihe Talaud hanya sebesar 0,21 persen bahkan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak memiliki lahan pertanian pangan. Lebih lanjut lagi, lahan pertanian pangan kedua terbesar di Sulawesi Utara berada di Minahasa yaitu sekitar 9,45 persen atau sebesar 10.146,5 Ha. Meskipun demikian persentase lahan pertanian pangan berkelanjutan ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan total luas lahan yang ada di Sulawesi Utara. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya 7.75 persen dari



total luas lahan di Sulawesi Utara sebesar 1.385.164 Ha (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 9-10).

**Tabel 5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

KABUPATEN/KOTA	SAWAH EKSISTING (HA)	LAHAN SAWAH CADANGAN (HA)
Bolaang Mongondow	22.099,0	18.818,3
Minahasa	7.576,9	2.569,6
Kepulauan Sangihe	9,1	-
Kepulauan Talaud	212,1	-
Minahasa Selatan	5.390,9	8.409,3
Minahasa Utara	3.146,1	4.358,0
Bolaang Mongondow Utara	5.730,6	5.090,3
Siau Tagulandang Biaro	-	-
Minahasa Tenggara	2.977,8	6.884,4
Bolaang Mongondow Selatan	1.331,6	8.594,2
Bolaang Mongondow Timur	1.655,8	400,7
Kota Manado	80,0	-
Kota Bitung	79,4	-
Kota Tomohon	675,7	-
Kota Kotamobagu	1.271,1	-
Sulawesi Utara	52.236	55.125
Total luas LP2B Sulut	107.361	

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. II.81

2. Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan pangan. Jumlah dan keberagaman jenis pangan (diversifikasi) sangat mendasar dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Untuk itu telah ditetapkan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Selama kurun waktu 2017 sampai tahun 2021 ketersediaan energi pangan di Sulawesi Utara telah mampu memenuhi ketersediaan ideal sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Demikian juga dengan konsumsi energi minimal telah melampaui angka kecukupan konsumsi energi minimal ideal sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Meskipun demikian, konsumsi energi minimal Sulawesi Utara mengalami penurunan secara bertahap selama 2017-2021.

Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) ketersediaan berada di atas skor AKE konsumsi selama 2017-2021 di Sulawesi Utara sebagaimana dilihat di Tabel 6. Pada tahun 2017-2018 terjadi kenaikan angka ketersediaan energi yaitu dari 3.259 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 3.284 kkal/kapita/hari pada tahun 2018, tetapi konsumsi energi mengalami penurunan dari 2.466,28 kkal/kapita/hari pada tahun 2017 menjadi 2.400,11 kkal/kapita/hari. Pada saat pandemi *COVID-19*, terjadi penurunan tajam angka ketersediaan energi yaitu sebesar 2.748 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan sedikit naik sebesar 2.812 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021. Ketersediaan energi ini, walaupun terjadi penurunan selama pandemi *COVID-19*, masih bisa mencukupi bahkan melebihi dari angka konsumsi energi sebesar 2.334,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 dan 2.335 kkal/kapita/hari pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 6. Ketersediaan dan Konsumsi Energi Pangan**

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*
Ketersediaan Energi Minimal	3.259	3.284	2.748	2.812	2.812
Konsumsi Energi Minimal	2.466,28	2.400,11	2.334,6	2.335	2.335

\*Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021  
Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. lampiran III. 8

Sebagai daerah dengan keanekaragaman hayati (biodiversity) dan dukungan kondisi geografis yang beragam, iklim dan cuaca yang mendukung serta keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan untuk dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak, dan potensi keanekaragaman hayati kelautan, serta potensi sumber daya manusia yang telah mencapai 2.621.923 jiwa penduduk Sulawesi Utara (Sensus Penduduk, 2020) maka semangat pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk Sulawesi Utara sepantasnya dapat diwujudkan dengan keterlibatan multi-sektor dan multi-pemangku kepentingan.

Dampak pandemi *COVID-19* telah memberi kondisi yang kurang stabil terkait keterjangkauan pangan, seperti skor AKE tahun 2020 walaupun di atas anjuran, namun untuk komoditas umbi-umbian (40 kkal/kapita/hari

atau 1,9 persen), buah/biji berminyak (22 kkal/kapita/hari atau 1,1 persen), kacang-kacangan (31 kkal/kapita/hari atau 1,5 persen), dan kelompok pangan lainnya (29 kkal/kapita/hari atau 1,4 persen) masih belum mencapai AKE yang ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 47). Sedangkan untuk padi-padian (1303 kkal/kapita/hari atau 62 persen), minyak dan lemak (275 kkal/kapita/hari atau 13,1 persen), pangan hewani (257 kkal/kapita/hari atau 12,2 persen), sayur dan buah (107 kkal/kapita/hari atau 6,9 persen), dan gula (87 kkal/kapita/hari atau 5,1 persen) telah melampaui skor AKE ideal (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021, hal. 47). Dikaitkan dengan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU)

Sementara itu tingkat asupan gizi yang baik khususnya balita dapat mengurangi jumlah balita *stunting* di suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis aspek pemanfaatan pangan dengan indikator persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*) pada suatu kecamatan, terlihat pada Tabel 7 bahwa dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi pengurangan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah), Prioritas 3 (Rentan Ringan), dan Prioritas 2 (Rentan Sedang), bahkan tidak ada lagi kecamatan yang tergolong Prioritas 1 (Rentan Tinggi). Sedangkan jumlah kecamatan yang tergolong Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang) dan Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi) bertambah.

**Tabel 7. Jumlah Kecamatan Menurut Prioritas Berdasarkan Indikator Persentase Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (*Stunting*)**

Kategori	Tahun	
	2020	2021
Prioritas 1 (Rentan Tinggi)	1	0
Prioritas 2 (Rentan Sedang)	7	3
Prioritas 3 (Rentan Ringan)	9	6
Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah)	19	15
Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)	40	47
Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi)	95	100
Total Kecamatan	171	171

Sumber: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) Provinsi Sulawesi Utara 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pangan Daerah, Desember 2021, hal. 47-48.

Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara. Tabel 8 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 192,37 ribu jiwa di tahun 2020 dan 196,35 ribu jiwa di tahun 2021. Persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 7,66 persen di tahun 2019 menjadi 7,77 persen di tahun 2021, Meskipun demikian, persentase penduduk miskin di tahun 2021 masih di bawah persentase penduduk miskin di tahun 2017 yaitu sebesar 8,1 persen.

**Tabel 8. Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin**

NO	KABUPATEN/KOT A	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu jiwa)					PERSENTASE PENDUDUK MISKIN				
		201 7	201 8	201 9	2020	2021	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1
1	Bolaang Mongondow	19,05	18,49	18,30	18,07	19,08	8,02	7,67	7,47	7,27	7,58
2	Minahasa	26,34	24,49	24,32	24,95	26,30	7,9	7,3	7,18	7,30	7,67
3	Kepulauan Sangihe	15,38	15,46	14,62	14,64	14,55	11,8	11,8 2	11,1 5	11,1 4	11,0 2
4	Kepulauan Talaud	8,84	8,68	9,10	8,84	8,37	9,77	9,5	9,86	9,49	9,00
5	Minahasa Selatan	20,26	19,54	19,49	19,38	19,77	9,78	9,34	9,26	9,14	9,37
6	Minahasa Utara	14,93	14,13	14,09	14,33	14,49	7,46	6,99	6,93	7,00	7,11
7	Bolaang Mongondow Utara	6,95	6,84	6,77	6,82	6,53	8,89	8,64	8,45	8,41	8,03
8	Kepulauan Sitaro	6,81	6,53	6,35	5,95	6,00	10,3 3	9,87	9,56	8,94	8,94
9	Minahasa Tenggara	15,57	14,73	14,22	13,73	13,31	14,0 8	13,2 9	12,7 8	12,3 0	12,4 7
10	Bolaang Mongondow Selatan	9,05	9,05	8,82	8,74	8,63	14,1 6	13,6	13,2 7	12,7 7	12,8 5
11	Bolaang Mongondow Timur	4,37	4,29	4,41	4,30	4,47	6,2	6,03	6,10	5,88	6,10
12	Kota Manado	23,39	23,21	23,89	25,55	26,78	5,46	5,38	5,51	5,86	6,19
13	Kota Bitung	14	14,34	14,10	14,18	14,33	6,62	6,67	6,49	6,41	6,43
14	Kota Tomohon	6,69	6,25	5,99	6,06	6,18	6,47	5,95	5,62	5,60	5,69
15	Kota Kotamobagu	7,28	7,49	7,31	7,06	7,56	5,9	5,96	5,71	5,42	5,74
	<b>SULAWESI UTARA</b>	<b>198,8 8</b>	<b>193,3 1</b>	<b>191,7 0</b>	<b>192,3 7</b>	<b>196,3 5</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>	<b>7,66</b>	<b>7,62</b>	<b>7,77</b>

Sumber: BPS Prov. Sulut 2022 dikutip dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (hal II-34 dan II-35)

Akan ada lebih banyak penduduk miskin dan berisiko masuk ke dalam kelompok rawan pangan jika pandemi ini berlangsung lebih lama dan memengaruhi perekonomian secara lebih parah. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Food Policy Research Institute (IFPRI)* dan *United Nation (UN)*, pandemi COVID-19 dapat memunculkan krisis

pangan baru yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara, terutama negara miskin dan berkembang<sup>4</sup>. Oleh karena itu, upaya- upaya untuk meningkatkan akses pangan masyarakat, khususnya selama pandemi dan beberapa waktu sesudahnya, perlu mempertimbangkan tidak hanya keterjangkauan harga pangan, melainkan juga daya beli penduduk miskin dan rentan.

### 3. Pemanfaatan Pangan

Konsumsi pangan yang beragam sangat penting oleh karena tubuh manusia memerlukan beragam jenis zat gizi yang bersumber dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat yang lebih luas baik wilayah, kabupaten/kota, provinsi sampai ke tingkat nasional. Gambaran kualitas konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

**Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara**

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,6	94,1	94,1	93,1	86	83,1

Sumber: RPJMD Sulut 2021-2026, hal. 84 dan RKP Sulut 2023, hal. II-77

Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6, selanjutnya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga mencapai 94,1 (Table 9). Meskipun terjadi kenaikan selama tahun 2016-2018, skor PPH Sulawesi Utara belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya

<sup>4</sup> <https://wartaekonomi.co.id/read296773/ketahanan-pangan-selama-pandemi-bagaimana-solusinya>, Senin, 27 Juli 2020

Lokal. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1 sebagai akibat dari pandemi *COVID-19*. Penurunan ini terus terjadi di tahun 2020 sebesar 86 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 83,1. Penurunan skor PPH sejak 2019 selain disebabkan oleh pandemi *COVID-19*, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga lebih khusus akibat pandemi *COVID-19*, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dan lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal. Oleh sebab itu, perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

### **Bidang Gizi**

Pencapaian bidang gizi di Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat dilihat pada beberapa indikator pembangunan kesehatan sebagai outcome utamanya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, pada indikator kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat menunjukkan adanya peningkatan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2021 – 2026 Provinsi Sulawesi Utara.

Angka kematian ibu pada tahun 2021 berada pada angka 172 per 100.000 kelahiran hidup di atas target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian halnya dengan angka kematian bayi pada tahun 2021 yang mencapai angka 5 per 1.000 kelahiran hidup melebihi target tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Meningkatnya status gizi masyarakat dapat dilihat dari pencapaian tahun 2021 berupa prevalensi *stunting* balita sebesar 3,10 persen lebih dari target tahun 2024 sebesar 14 persen. Demikian juga angka *wasting* balita pada tahun 2021 yang mencapai angka 2,3 persen yang melebihi target tahun 2024 sebesar 7 persen (angka pencapaian lebih rendah menunjukkan bahwa pencapaian lebih baik).

Namun demikian, pencapaian-pencapaian ini masih menyisakan kasus yang masih saja terjadi. Masih terdapat 3.134 balita *stunting* dari 101.178 balita yang diukur panjang badan/tinggi badannya, di samping juga terdapat sebanyak 2.058 balita masih termasuk kategori *wasting* (2,03 persen) (Data E-PPGBM, 2021). Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi peningkatan kasus bila tidak dilakukan tindakan pencegahan secara terus menerus, di samping usaha-usaha penanganan yang telah dilaksanakan selama ini, karena masalah gizi adalah hal yang berlangsung terus menerus sepanjang siklus kehidupan manusia.

Perlu diperhatikan bahwa *stunting* banyak ditemukan tidak hanya di kalangan penduduk miskin, melainkan juga di kalangan penduduk berpenghasilan lebih tinggi. Data Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa 25 persen anak dari desil kesejahteraan tertinggi mengalami *stunting*, dibanding 43 persen anak dari desil termiskin. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan hanya disebabkan kurangnya akses pangan (kasus rumah tangga miskin), melainkan juga oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, kesehatan, perilaku, pola asuh, dan kognitif lain, seperti pemberian air susu ibu (ASI) non-eksklusif dan pendidikan orang tua<sup>5</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara yang didapat dari Laporan Rutin Kabupaten/Kota tahun 2021 ditemukan 4,7 persen ibu hamil menderita anemia, 11,62 persen ibu hamil menderita KEK, di mana 89,6 persen ibu hamil tercakup dalam pelayanan pemberian tablet tambah darah dan sebesar 95,98 persen ibu hamil KEK tercakup dalam program PMT. Dari 68,4 persen balita ditimbang berat badannya, 85,5 persen balita naik berat badan saat ditimbang (Lap. Rutin Kab/Kota, 2021). Dari laporan ini pula ditemukan hanya 35,3 persen saja bayi berumur 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif dan 93,7 persen balita gizi kurang (6-59 bulan) mendapatkan PMT.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangsadaran ibu-ibu di Provinsi Sulawesi Utara tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi berusia sampai 6 bulan. Pencapaian yang hanya sebesar 35,3 persen memiliki potensi besar kekurangan zat gizi bagi bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Di samping itu, wanita memiliki peran besar dalam menjaga kualitas status gizi dalam keluarga baik sebagai ibu yang memiliki anak balita maupun

---

<sup>5</sup> Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, dan Lynnette M. Neufeld. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition 14

sebagai calon ibu serta sebagai ibu rumah tangga dalam mengatur kebutuhan gizi semua anggota keluarga. Pola asuh gizi ibu dalam keluarga akan menentukan status gizi seluruh anggota keluarga. Dalam masalah ini terlihat pentingnya menumbuhkan kesadaran bagi wanita untuk berperan sebagai ibu, calon ibu dan ibu rumah tangga melalui berbagai program promosi kesehatan. Intervensi gizi terhadap wanita juga tetap perlu diberikan perhatian khusus dalam setiap siklus kehidupan wanita.

Berkebalikan dengan perbaikan dalam penanganan kekurangan gizi, secara nasional, masalah kelebihan gizi justru meningkat. Pada 2018, tingkat kelebihan berat badan dan obesitas di kalangan dewasa mencapai 35,4 persen, dengan obesitas sendiri menyumbang 21,8 persen. Provinsi Sulawesi Utara sendiri, menurut hasil Riskesdas 2018 ini, memiliki prevalensi obesitas tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 30,2 % di atas rata-rata nasional yang sebesar 21,8 %. Kecuali untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun yang prevalensi kelebihan berat badannya turun dari 11,9 persen menjadi 8 persen antara 2013 dan 2018, kelebihan gizi terus mengalami kenaikan di semua kelompok umur. Tingkat obesitas pada perempuan yang jauh lebih tinggi daripada pada laki-laki. Riskesdas 2018 menunjukkan 29,3 persen perempuan dewasa (18 tahun ke atas) mengalami obesitas dibandingkan 14,5 persen laki-laki dewasa.

Secara hormonal, perempuan lebih gampang gemuk dibandingkan laki-laki. Penurunan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur metabolisme tubuh pada periode pasca pernikahan dapat menjadi salah satu pemicunya, terlebih saat seorang wanita menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Faktor kontekstual yang berbeda mendorong perbedaan dalam konsumsi makanan, meski perempuan dilaporkan lebih banyak mengonsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan laki-laki, namun saat yang sama perempuan juga lebih banyak mengonsumsi makanan manis, dibandingkan laki-laki. Perempuan yang berstatus kawin, berpendapatan tinggi, tinggal di perkotaan, beraktivitas fisik ringan, mengonsumsi makanan dan minuman manis >10 persen AKE, mengonsumsi karbohidrat >55 persen AKE, serta berpendidikan tinggi berisiko mengalami kegemukan berturut-turut 2.712, 1.566, 1.358, 1.213, 1.100, 1.119, 0.817 kali lebih besar dibandingkan dengan kelompok pembandingnya<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Diana, Rian, et al. (2013). Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. *Jurnal Gizi Pangan* 8(1),1-8.



Masalah gizi lain yang dihadapi Indonesia adalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB), kekurangan vitamin A (KVA), dan lain-lain. Masalah kekurangan zat gizi mikro ini sering sekali menimbulkan masalah gizi yang tidak tampak sehingga disebut sebagai kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*). Dari berbagai survey konsumsi, diketahui bahwa pola konsumsi masyarakat hanya mampu memenuhi sekitar 40-60 persen kebutuhan zat gizi mikro sehari khususnya vitamin A, yodium dan zat besi. Data terakhir masalah gizi mikro menunjukkan bahwa sebanyak 37,1 persen ibu hamil dan 28,1 persen balita menderita anemia (Riskesmas 2013).

Di sisi lain, meskipun secara klinis kekurangan vitamin A sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, namun masih ada sekitar 0,8 persen anak usia 5-12 tahun mengalami kurang vitamin A subklinis (SEANUTS 2011). Demikian pula dengan masalah kurang yodium yang ditunjukkan oleh Riskesdas 2013 bahwa berdasarkan metode rapid test kadar yodium dalam garam, sebanyak 91,9 persen didapatkan garam yang beredar di masyarakat telah mengandung yodium. Namun persentasinya akan lebih rendah lagi jika ditilik dengan menggunakan metode titrasi. Hanya sekitar setengah atau 47,2 persen dari masyarakat yang mengonsumsi garam beryodium secara memadai (18 ppm). Hal ini jauh di bawah target nasional dan global yang direkomendasikan konsumsi garam beryodium masyarakat di atas 90 persen. Kondisi konsumsi garam beryodium masyarakat ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2007 sebanyak 56,5 persen. Metode lain untuk melihat kadar yodium dalam tubuh dapat dilihat melalui MUIC (*Median Urinary Iodine Concentration*) dengan *cut off* yang direkomendasikan adalah 100-299 µg/L. Diketahui bahwa kadar yodium pada kelompok umur anak usia sekolah (6-12 tahun) cenderung tinggi 215 µg/L dibandingkan perempuan usia subur (15-49 tahun) 215 µg/L, dan ibu hamil 169 µg/L. Dalam upaya penanggulangan masalah gizi mikro pemerintah telah melaksanakan program suplementasi gizi sejak tahun 1970-an hingga saat ini, seiring dengan upaya perbaikan konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang. Selanjutnya program dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi yaitu melalui program fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan telah didokumentasikan sebagai bagian dari program nasional perbaikan gizi masyarakat. Fortifikasi pangan juga diakui sebagai intervensi yang dinilai “*cost effective*” untuk menanggulangi defisiensi zat gizi mikro karena mampu menjangkau semua kelompok masyarakat dari berbagai kalangan.

## B. Tantangan

Analisis situasi menunjukkan bahwa Sulawesi Utara berhasil mencatat beberapa kemajuan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.

1. Tantangan Aspek Ketersediaan – Harga komoditas pangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat menjadi indikasi bahwa peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras, belum bisa mengimbangi kenaikan konsumsi dan kebutuhan akan komoditas ini. Ketersediaan benih yang bermutu dan pupuk tepat pada waktu dan tempatnya masih menjadi masalah yang dihadapi oleh petani di Sulawesi Utara. Di samping itu juga pengelolaan pertanian umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional dengan sentuhan teknologi yang terbatas.
2. Tantangan Aspek Keterjangkauan – Keadaan geografi Sulawesi Utara yang terdiri dari mainland dan kepulauan menjadi tantangan utama dalam mendistribusikan pangan ke seluruh penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi sangat penting untuk mendistribusikan logistik pangan sampai ke seluruh pelosok wilayah Sulawesi Utara. Hambatan transportasi dapat mengakibatkan “*extra cost*” (biaya lebih) terhadap logistik pangan dan tidak sampai pada waktunya sehingga mempengaruhi aspek keterjangkauan pangan masyarakat khususnya di daerah pedalaman. Ini kemudian dapat menyebabkan ketidakcukupan pangan, malnutrisi, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kesulitan mendapatkan pangan yang layak. Sekitar 21 juta orang di Indonesia masih memiliki asupan kalori di bawah kebutuhan pangan minimum pada 2018, meski prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) terus menurun. Kemiskinan dan relatif tingginya harga pangan terhadap pendapatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia khususnya Sulawesi Utara dalam upaya meningkatkan akses pangan.
3. Tantangan Aspek Pemanfaatan:
  - a. Pola konsumsi sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara masih kurang ideal dan belum beragam, dengan karbohidrat masih mendominasi asupan kalori; konsumsi protein, buah-buahan, dan sayuran masih belum mencukupi; serta peningkatan konsumsi makanan olahan dan siap saji di perkotaan maupun perdesaan. Percepatan pembangunan di

Sulawesi Utara juga mengakibatkan banyak makanan siap saji membanjiri kuliner baik di kota maupun di kabupaten yang mana mulai mengubah pola makan dan ragam pangan yang dikonsumsi masyarakat.

- b. Prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas terus meningkat di kalangan anak usia 6 sampai 12 tahun, remaja, dan orang dewasa, meski permasalahan gizi balita di Indonesia menurun sejak 2013. Tingginya angka obesitas akan mempengaruhi angka harapan hidup di Sulawesi Utara. Krisis yang disebabkan oleh pandemi *COVID-19* dan kebijakan pembatasan sosial menjadi tantangan kuat bagi kemajuan yang telah dicapai selama ini. Disamping itu juga permasalahan *food waste* mulai menonjol terlebih saat ini industri dan pusat-pusat kuliner bertumbuh pesat di daerah Sulawesi Utara seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata ke daerah ini yang mana tercatat sampai 129.588 kunjungan pada tahun 2019 (RPJMD Sulut 2021-2026, hal. II.123).

#### 4. Tantangan Aspek Kelembagaan dalam Pelaksanaan Rancangan RAD-PG 2022-2026

- a. Keterbatasan kapasitas dan kualitas pengelola program dalam penyelenggaraan RAD-PG di daerah
- b. Keberlanjutan komitmen para pemimpin daerah dalam memprioritaskan pembangunan pangan dan gizi di daerah
- c. Internalisasi RAD-PG sebagai dokumen pendukung aksi #2 pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *stunting* di daerah.
- d. Masih minimnya pelibatan sektor non-pemerintah di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bidang pangan dan gizi

**BAB III**  
**RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI**

**A. Tujuan dan Sasaran**

RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 memiliki fungsi sebagai dokumen yang diacu oleh Dinas/Badan/Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kegiatan pangan dan gizi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sesuai wewenang dan kebutuhan masing-masing. Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara merupakan rencana aksi pembangunan pangan dan gizi secara umum dan luas sehingga kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting* juga menjadi bagian dari dokumen ini, termasuk pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Sulawesi Utara.

Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 adalah:

- 1. Mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan pangan dan gizi daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
- 2. Meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga;
- 3. Memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target kedua TPB dan RPJMD 2021-2026 dalam pembangunan pangan dan gizi.

Sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi Sulawesi Utara adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026 dan juga sebagai instrumen pencapaian tujuan kedua TPB.

**Tabel 10. Indikator dan Target Pembangunan Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2021-2026**

No.	Indikator	2022 (tahun dasar)	2023	2024	2025	2026
Intermediate Outcome						
1	Indeks Ketahanan Pangan	79,04	79,67	80,31	80,95	81,60
2	Persentase cadangan pangan	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)	100% (275 ton)
3	Skor Pola Pangan Harapan	94,5	94,5	94,7	95	95
4	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.400	2.400	2.400	2.400	2400
5	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	63	63	63	63	63
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6	5,5	5	5	5
7	Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5	5	4	3.5	3
8	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	67	67,5	68	70	72
9	Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	12	12	14.6	15	16
10	Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10	10	11	12	13
11	Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	300	300	316,3	350	400
12	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85	89	92	96	100
13	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	90% Peneri ma BPNT	90% Peneri ma BPNT	100% Penerima BPNT	100% Pener ima BPNT	100% Pener ima BPNT
14	Persentase makanan memenuhi syarat (%)	80	80	86	90	100
15	Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,03	10,03	8,03	6,03	4,03
Outcome						
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15	15	14	13	12
2	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7,1	7	7	6,8	6,8
3	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	23	23	21,8	21	20

Sumber: Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Perda Prov Sulut 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026

## B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara difokuskan dalam upaya penajaman kontribusi program/kegiatan dalam pencapaian target pembangunan pangan dan gizi yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026 dan dokumen kebijakan lain yang relevan seperti Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020-2024 serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Tujuan strategi dan aksi penajaman lebih difokuskan untuk menghadirkan daya ungkit sistem pangan dalam perbaikan konsumsi gizi keluarga yang beragam, seimbang dan aman yang mencakup empat tujuan strategis yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial);
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pengembangan aksi di setiap strategi dilakukan dengan prinsip menghadirkan intervensi lintas sektor ditingkat keluarga secara konvergensi dan terintegrasi, memegang teguh prinsip no one left behind dengan memberi prioritas kelompok rawan gizi, implementatif, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 menitikberatkan pada strategi yang spesifik untuk meningkatkan daya ungkit kebijakan pangan dan gizi yang menjamin keberlangsungan produksi hingga konsumsi di tingkat rumah tangga. Selain itu, fokus kepada kelompok paling rentan segala bentuk malnutrisi (gizi kurang maupun gizi lebih) sangat penting untuk mengatasi ketimpangan. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien terutama dalam kondisi pandemi dan masa transisi *pasca pandemic COVID-19*<sup>7</sup>.

### **C. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi**

Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara merupakan instrumen koordinasi yang disusun dan diimplementasikan oleh Dinas/Badan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat kabupaten, dan kota. Beberapa penguatan dalam rancangan rencana aksi pangan dan gizi terlihat dalam aspek penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD.

---

<sup>7</sup> Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020, Smeru Research Institute, Jakarta.

Selain itu rancangan rencana aksi telah menggunakan pendekatan kesetaraan gender dalam menyusun aksi serta mempertimbangkan respon pangan dalam kondisi kegawatdaruratan seperti pandemi COVID-19. Menimbang tujuan penyusunan dan posisi strategis RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara, maka RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 disusun dengan konsep yang berbeda dengan periode sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 11.

**Tabel 11. Perbedaan Konsep Penyusunan Rancangan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026**

Perbedaan	Konsep Lama	Konsep Baru
Pendekatan Aksi	Dibagi ke dalam 5 pilar rencana aksi	Dibagi ke dalam 4 tujuan strategis
Matriks Aksi	Berisi sebagian besar kompilasi kegiatan dalam dokumen perencanaan yang sedang berjalan	Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan kedua TPB, RPJMN dan RPJMD (untuk daerah)
Fungsi	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai dokumen perencanaan dan instrumen koordinasi lintas sektor	Rencana aksi pangan dan gizi sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan dan tetap sebagai instrumen koordinasi lintas sektor
Aspek Gender	Aksi pangan dan gizi yang responsif gender masih sangat minim	Mempertimbangkan kesetaraan gender sebagai pendekatan penting dalam merumuskan dan melaksanakan aksi yang berdaya ungkit.
Aspek Ketahanan Pangan dan Gizi	Aksi yang diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi termasuk perlindungan gizi dalam kedaruratan yang masih terbatas	Aksi diarahkan untuk penguatan sistem pangan yang sensitif gizi makin ditingkatkan demikian pula dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi dalam kondisi gawat darurat termasuk pandemi COVID-19

**Respon Kebijakan Pangan dan Gizi selama Kegawatdaruratan Pandemi COVID-19**

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Paling tidak dua tanggung jawab pemerintah tersebut tercantum dalam

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi dasar kuat agar kebutuhan gizi masyarakat tetap diperhatikan bahkan dalam situasi darurat sekalipun seperti situasi bencana atau pandemi.

Pandemi *COVID-19* yang saat ini terjadi hampir di seluruh negara berdampak ke segala dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap kebutuhan dasar penduduk antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya saat himbauan beraktifitas harus dibatasi mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi situasi penyebaran *COVID-19* yang begitu cepat, Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status tanggap darurat pada tanggal 17 Maret 2020 Pemerintah juga menetapkan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

Dengan terjadinya pandemi *COVID-19*, status tanggap darurat yang diikuti dengan kebijakan PSBB akan berdampak signifikan tidak hanya pada aktivitas masyarakat tetapi juga terhadap kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan pangan bergizi. Himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (*working for home*) dan menjaga jarak secara fisik (*social/physical distancing*) serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian, telah membuat perubahan situasi yang baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan.

Untuk mengantisipasinya Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian No. 03/SE/KN.230/M/05/2020 tentang Antisipasi Terjadinya Krisis Pangan dengan memastikan kesiapan percepatan tanam Musim Tanam II (MT II) tahun 2020, memastikan kesiapan cadangan beras dengan berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di level desa, serta sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal.

Dari perspektif produksi, para petani dan produsen pangan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi *COVID-19*. Untuk memastikan keamanan pangan olahan,



Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kemudian mengeluarkan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan sebagai upaya mendukung pelaku usaha dalam memastikan rantai produksi dan distribusi pangan olahan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status darurat bencana wabah *COVID-19* di Indonesia.

Mobilisasi bahan pangan juga telah mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya *social/physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan *platform* digital atau *online*.

Dari perspektif distribusi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga sudah menghimbau seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Indonesia melalui Surat Nomor AJ.303/I/I/DJPD/2020 agar selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Asosiasi Perusahaan Logistik setempat untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan logistik bagi masyarakat.

Dari perspektif konsumsi, kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah gizi akut (gizi kurang dan gizi buruk) pada kelompok rentan, bahkan masalah gizi kronik (*stunting*) pun mungkin akan meningkat jika penetapan tanggap darurat *COVID-19* berlangsung dalam waktu yang cukup lama (*prolonged emergency situation*). Pelayanan gizi diharapkan dapat tetap berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian terkait kebijakan pembatasan sosial yang diatur oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penularan *COVID-19* guna meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat dengan memprioritaskan kelompok rawan, yaitu bayi dan balita, remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui pada situasi pandemi *COVID-19*. Kondisi kedaruratan di berbagai daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Beberapa daerah telah melakukan PSBB atau pembatasan karena terdapat transmisi lokal. Sementara itu, beberapa daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal virus *COVID-19* serta mobilisasi penduduk antar wilayah yang sangat minimal, mereka tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan *physical distancing*.

Untuk daerah yang memiliki kebijakan PSBB atau terdapat transmisi lokal, walau terjadi pembatasan pelayanan, perlu dipastikan bahwa ibu hamil,

ibu menyusui, bayi dan balita, akan tetap mendapatkan pelayanan gizi selama masa tanggap darurat. Sementara itu, bila untuk daerah tidak menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal serta mobilisasi penduduk yang minimal, pelayanan gizi tetap dilakukan dan disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa Tanggap Darurat Pandemi *COVID-19* untuk tenaga kesehatan. Tidak ketinggalan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merilis materi edukasi untuk tenaga medis perempuan dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi selama masa tanggap darurat *COVID-19*.

Kehadiran RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara akan mendukung kepatuhan terhadap penyediaan layanan pangan dan gizi yang berkelanjutan selama pandemi, serta berperan dalam memastikan terkoordinasinya kegiatan yang ditujukan untuk melindungi populasi yang rentan dan mencegah situasi pangan dan gizi memburuk, dengan pertimbangan khusus diberikan pada aspek gender dari dampak pandemi dan kondisi merugikan yang dialami perempuan dan anak perempuan

### **Pengarusutamaan Gender dalam Rancangan Rencana Aksi Pangan dan Gizi**

Pelaksanaan PUG juga diperkuat pasca keluarnya Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU ini juga memandatkan keterlibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan desa. Dalam konteks ini, strategi PUG melalui PPRG menjadi strategis untuk diintegrasikan di dalam pembangunan desa. Dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan kerangka regulasi, masa berlaku SEB yang sudah selesai, serta kebutuhan kontekstual PPRG di dalam pembangunan desa, maka pada tahun 2017 disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender dan dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada tahun 2018 sampai saat ini.

Dalam konteks pembangunan pangan dan gizi, aspek gender menjadi salah satu isu yang penting diperhatikan. Di dalam Global Nutrition Report

2020 disebutkan bahwa gender menjadi determinan sosial dari ketidaksetaraan Outcome gizi yang menyebabkan malnutrisi bersama dengan faktor usia, suku dan pendapatan atau status ekonomi. Aspek gender menyebabkan munculnya perbedaan dalam hal mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat atas intervensi pangan dan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi seseorang. Dengan kata lain, aspek gender bersama-sama dengan determinan sosial lainnya akan turut mempengaruhi efektifitas dan efisiensi intervensi.

Oleh karena itu, perspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang akan diintegrasikan di dalam penyusunan kebijakan/program/intervensi pembangunan pangan dan gizi, baik dari sisi proses maupun substansi. Kegiatan yang berkaitan dengan gender tertentu telah dimasukkan dalam matriks (Lampiran II Kepmen PPN/Kepala Bappenas) dan beberapa indikator akan diukur dan dipilah berdasarkan jenis kelamin jika relevan. Dengan demikian, intervensi gizi yang disusun baik spesifik maupun sensitif diharapkan mampu merespon secara tepat berbagai perbedaan kebutuhan gizi yang timbul dari kombinasi berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta faktor geografis.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN AKSI PANGAN DAN GIZI**

#### **A. Strategi dan Aksi**

Tujuan utama pembangunan pangan dan gizi di Indonesia adalah terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan ini disusun kerangka pikir RAD-PG Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan kerangka pikir RAN-PG 2021-2024 sebagaimana tersaji pada Gambar 3. Strategi ketahanan pangan dan gizi tersebut telah dirincikan sebagaimana tertera pada matriks aksi penajaman pada Bab IV yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator, dan pelaksana (koordinator dan sektor lainnya yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi, yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (*stunting*, *wasting*, kekurangan zat gizi mikro) serta mengendalikan penyakit tidak menular.

1. Peningkatan **Ketersediaan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
  - a. Peningkatan produksi pangan yang beragam;
  - b. Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi);
  - c. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat;
  - d. Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (*food loss*); dan
  - e. Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi.
2. Peningkatan **Keterjangkauan** Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman
  - a. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;
  - b. Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;
  - c. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;
  - d. Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan

dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;

- e. Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;
- f. Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana; dan
- g. Pengembangan sistem logistik pangan.

### 3. Peningkatan **Pemanfaatan** Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)

- a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;
- b. Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap tahun;
- c. Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;
- d. Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;
- e. Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;
- f. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;
- g. Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat;
- h. Pengendalian pemborosan pangan (*food waste*);
- i. Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi; dan
- j. Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.

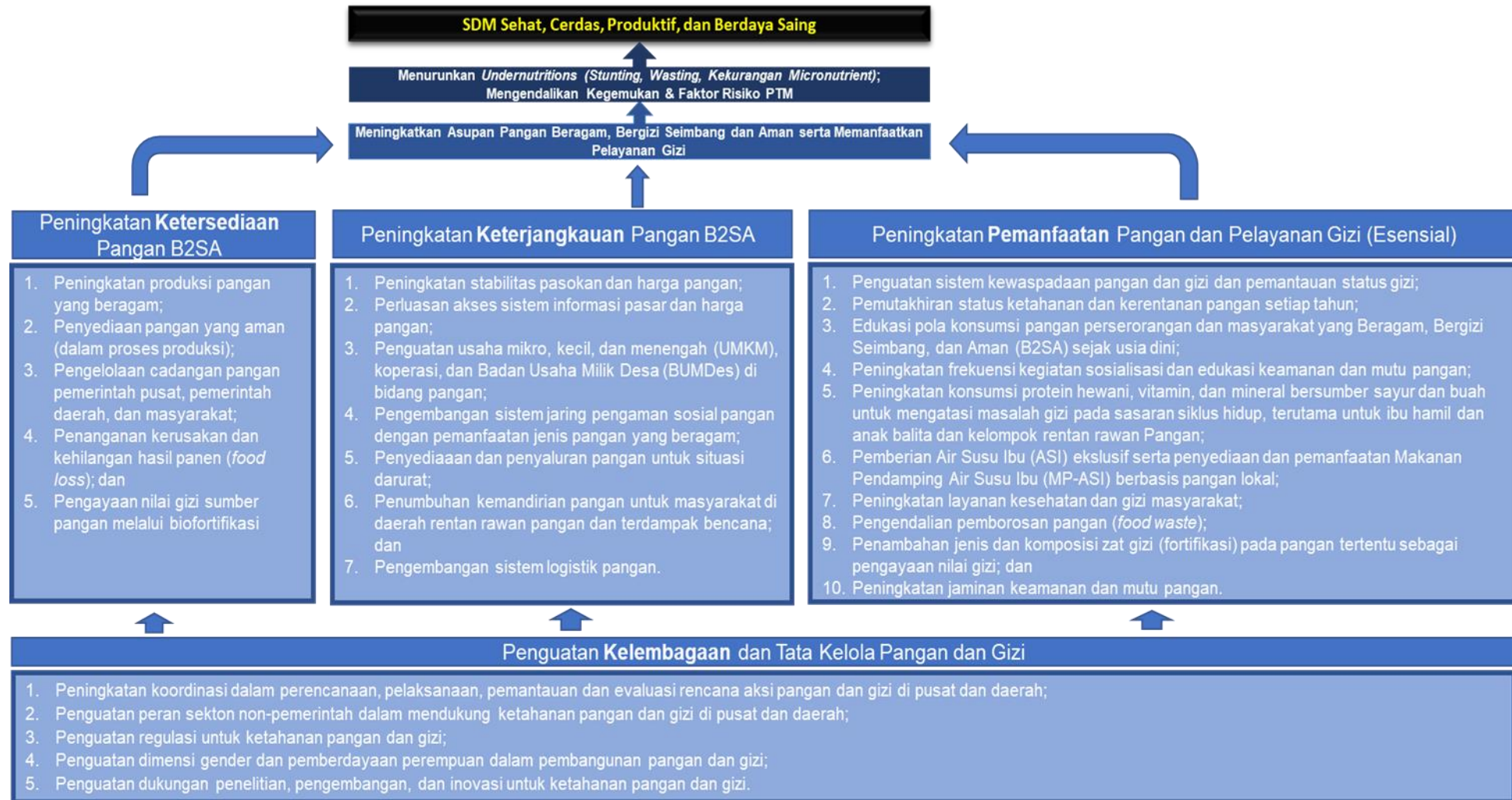
### 4. Penguatan **Kelembagaan** dan Tata Kelola Pangan dan Gizi

- a. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Penguatan peran sektor non-pemerintah dalam mendukung

ketahanan pangan dan gizi di provinsi dan kabupaten/kota;

- c. Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi khususnya untuk pengendalian dampak pandemi *COVID-19* terhadap ketahanan pangan dan gizi;;
- d. Penguatan dimensi gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan pangan dan gizi; dan
- e. Penguatan dukungan penelitian, pengembangan, dan inovasi untuk ketahanan pangan dan gizi.

**Gambar 3. Kerangka Pikir Rancangan RAD PG 2022-2026**



## **B. Pengorganisasian**

### **Pemerintah Provinsi**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024 dan ditetapkan oleh Gubernur serta disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi Rancangan RAD-PG ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Forum Koordinasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Forum Koordinasi ini terdiri dari Forum Pengarah, Forum Teknis, Kelompok-Kelompok Kerja dan Forum Tenaga Ahli. Forum Koordinasi ini menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi teknis sehingga setiap perangkat daerah dan instansi terkait lainnya melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara tersebut, sebagai berikut:

#### **Forum Pengarah**

Penanggung jawab : 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

2. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Utara

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulawesi Utara



3. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulawesi Utara
5. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara

### **Forum Teknis**

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Sekretaris : 1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Sulawesi Utara

Utara 3. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi

Anggota : 1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara

3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

5. Kepala Balai Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

8. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

## Sulawesi Utara

11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sulawesi Utara
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara
13. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
14. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara
16. Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Sulawesi Utara
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

## **Kelompok Kerja**

### A. Kelompok Kerja Ketersediaan

Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Unsur Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
4. Unsur Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
7. Unsur Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara

9. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### B. Kelompok Kerja Keterjangkauan

Koordinator : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  3. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  4. Unsur Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  6. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  7. Unsur Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Sulawesi Utara
  8. Unsur Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### C. Kelompok Kerja Pemanfaatan

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Unsur Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  3. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  4. Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
  5. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Unsur Badan Urusan Logistik (BULOG) Provinsi Sulawesi Utara
7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara
8. Unsur Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9. Unsur Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sulawesi Utara
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### D. Kelompok Kerja Kelembagaan

Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Sulawesi Utara

Anggota : 1. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan  
Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Unsur Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara

5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara

6. Unsur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Utara

7. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### **Forum Tenaga Ahli**

Koordinator : Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin.,  
MPubPol., Ph.D

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Lucia C. Mandey, MS

2. Josia O. Lempoy, ST., M.Ars

3. Dr. Agusteivie A. J. Telew, S.Ked., M.Kes., AIFO

### **Tugas dan Fungsi**

#### **1. Forum pengarah :**

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

#### **2. Forum Teknis:**

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD- PG;
- b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
- g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

### 3. Kelompok Kerja

- a. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.
- b. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan.
- c. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.
- d. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

### 4. Forum Tenaga Ahli

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang disampaikan dari perangkat daerah maupun stakeholder terkait;
- b. Melakukan proyeksi terhadap rencana target kinerja;
- c. Menyusun narasi, gambar, tabel, matriks aksi sesuai sistematika penyusunan.

### **Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pemerintah kabupaten/kota membentuk forum koordinasi untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) kabupaten/kota. Forum koordinasi yang dimaksud adalah menggunakan forum koordinasi yang sudah ada seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau membentuk forum koordinasi baru yang sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di daerah. Forum

dapat dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perencanaan dan pembangunan daerah. Sedangkan keanggotaan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan dapat juga menambahkan pemangku kepentingan lainnya di bidang pangan dan gizi.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih rinci mengenai pengorganisasian forum koordinasi rencana aksi pangan dan gizi di kabupaten/kota serta operasionalisasinya dapat dilihat pada Pedoman Penyusunan RAD-PG yang telah ditetapkan bersama RAN-PG. Penyusunan RAD-PG kabupaten/kota dapat mengacu pada RAN-PG 2021-2024 dan RAD-PG 2023-2026 Sulawesi Utara ini sehingga semua kegiatan di bidang pangan dan gizi dapat sinkron di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

### **C. Peran Sektor Non-Pemerintah**

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti; lembaga swadaya masyarakat (RARE, Swara Parangpuang, YAPEKA Sulawesi Utara, YBT/Yayasan Bumi Tangguh), perbankan (Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bank Sulutgo, Bank BRI Wilayah Manado), dunia usaha (Cargill Indonesia, PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Manado, PT Telkom Witel Sulut Malut, PT Pertamina (Persero) Sulutgo, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo), perguruan tinggi (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Universitas Katolik De La Salle Manado), organisasi profesi (IDI/Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Utara, PPNI/Persatuan Perawat Nasional Sulawesi Utara, PERSAGI/Persatuan Ahli Gizi Indonesia Sulawesi Utara, HKTI/Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Utara, Kelompok Tani dan Nelayan Provinsi Sulawesi Utara), mitra pembangunan, media massa (JIPS/Jurnalis Independen Pemprov Sulut) dan berbagai kelompok masyarakat madani (PKK Provinsi

Sulawesi Utara) dan kelompok masyarakat lainnya terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi pangan dan gizi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya di kabupaten/kota;
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah;
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal;
4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program serta pendampingan teknis dalam menyusun RAD-PG serta implementasi programnya;
5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya;
6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAD-PG.

Peran dari lembaga-lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan RAD-PG Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 dapat dilihat lebih rinci dalam Bab VIII mengenai matriks dukungan program dan kegiatan Non Pemerintah.

## **D. Pembiayaan**

Untuk menjalankan rancangan rencana aksi ini, memerlukan dukungan dan pengelolaan anggaran. Namun demikian seperti dapat dilihat di dalam RPJMD 2021-2026, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan RAD-PG 2023-



2026 tidak tersedia secara khusus. Walaupun demikian, Rencana Aksi Pangan dan Gizi perlu mendapatkan kepastian pembiayaan karena akan diacu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan melalui penajaman program/kegiatan yang sudah ada. Pembiayaan dimaksud dapat berasal dari pemerintah (pusat dan daerah), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), CSR (*Corporate Social Responsibility*), donor/mitra pembangunan, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan sumber pembiayaan dari pemerintah (pusat dan daerah) dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan penganggaran dalam program dan kegiatan yang relevan, atau dengan kata lain program dan kegiatan yang terkait dengan rincian Strategi, Aksi, dan Keluaran penajaman program pangan dan gizi tahun 2023-2026.

Mekanisme pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara menambahkan, merevisi, komponen, sub-komponen, ataupun output, pada program dan kegiatan perangkat daerah dan lembaga vertikal yang terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 pada saat penyusunan anggaran tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategi SKPD.

Sementara itu untuk melakukan mobilisasi sumber daya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan RAD-PG 2023-2026, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara akan melibatkan penuh perangkat daerah teknis dalam menyusun aksi penajaman beserta indikatornya, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasinya. Mobilisasi sumber daya difokuskan pada perangkat daerah teknis beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aksi penajaman dalam RAD-PG beserta pendanaannya. Di sisi lain, urusan pembinaan dan pengawasan perihal penetapan RAD-PG oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh Sekretariat Provinsi.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi penajaman dalam RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pelaporan, pertemuan rutin, supervisi (kunjungan lapangan) dan dapat memanfaatkan kegiatan survei maupun riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masing-masing perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi aksi RAD-PG secara mandiri sesuai dengan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing;
2. Bappeda Provinsi melakukan koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah melalui pertemuan dan evaluasi rutin pelaksanaan RAD-PG;
3. Bappeda Provinsi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG bersama Kementerian PPN/Bappenas melalui pertemuan rutin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas capaian pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan minimal sekali di akhir tahun;
4. Teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan RAD-PG.

Matriks aksi untuk implementasi RAD-PG sebagaimana tercantum dalam Bab VI akan merincikan aksi, indikator dan target yang akan dipantau dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan terkait selama periode RAD-PG.

#### **A. Pemantauan RAD-PG**

Secara teknis ruang lingkup kegiatan pemantauan RAD-PG dapat dibagi menjadi empat yaitu: substansi, pelaksana, waktu, dan umpan balik hasil.

1. Substansi pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi pemantauan adalah:

- a) Strategi, aksi, dan indikator (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 12;
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut dapat menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.

Apabila diperlukan, kegiatan pemantauan juga dapat diperluas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra percepatan perbaikan gizi (non-pemerintah).

2. Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah dan atau pemangku kepentingan terkait dengan dikoordinir oleh Bappeda Provinsi.

3. Waktu pemantauan

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

4. Umpan balik

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan penyesuaian dan pembelajaran untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah kegiatan pemantauan dilakukan.

Tabel 12. Format Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

Strategi	Aksi	Indikator Kinerja/Keluaran	D/B Penanggung Jawab	Capaian		Keterangan/ Rekomendasi
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Peningkatan <b>Ketersediaan</b> Pangan B2SA						
Peningkatan <b>Keterjangkauan</b> Pangan B2SA						
Peningkatan <b>Pemanfaatan</b> Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)						
Penguatan <b>Kelembagaan</b> dan Tata Kelola Pangan dan Gizi						

**Tabel 13. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelenggaraan RAD-PG**

Tujuan Strategis	Dinas/ Badan	Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
		Kategori*	Deskripsi		
Peningkatan <b>Ketersediaan</b> Pangan B2SA					
Peningkatan <b>Keterjangkauan</b> Pangan B2SA					
Peningkatan <b>Pemanfaatan</b> Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)					
Penguatan <b>Kelembagaan</b> dan Tata Kelola Pangan dan Gizi					

\*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

## **B. Evaluasi RAD-PG**

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD-PG dengan ruang lingkup evaluasi terhadap *intermediate outcome* (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan *outcome* (3 indikator pembangunan bidang gizi) seperti yang tercantum pada Tabel 10.

## **C. Pelaporan RAD-PG**

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada awal tahun untuk pelaporan kegiatan periode tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada sub bagian mekanisme pelaporan.

### **1. Tujuan Pelaporan**

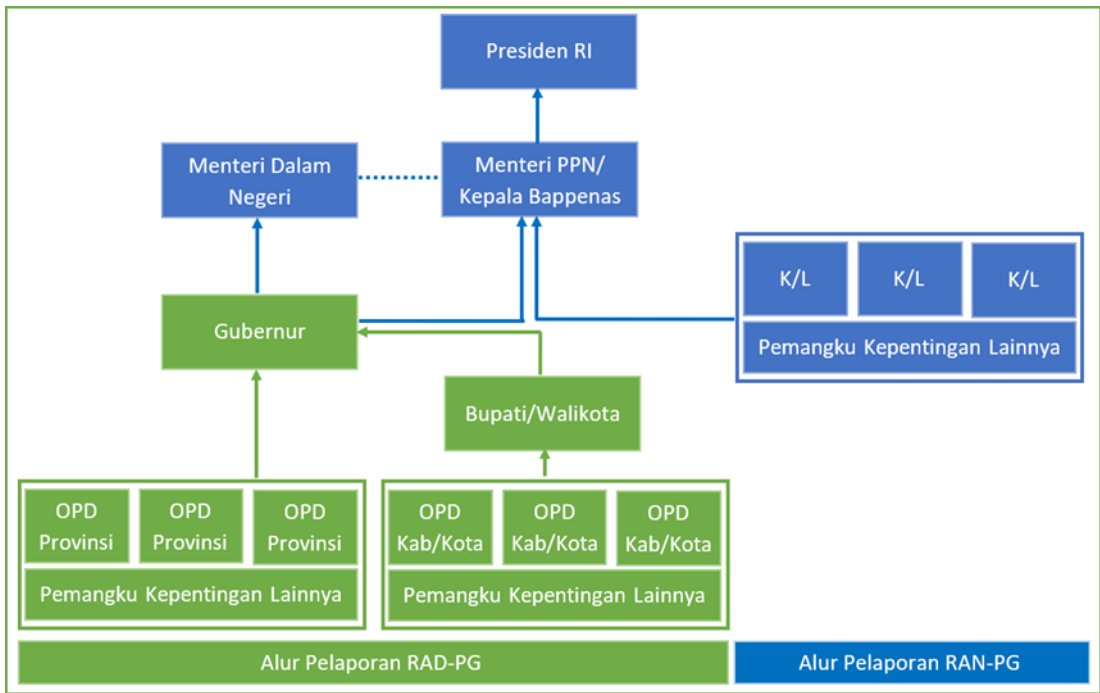
- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

### **2. Mekanisme Pelaporan**

Mekanisme pelaporan dapat dilihat melalui Gambar 4 yakni pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada

Gubernur paling lambat 28 Februari tahun berikutnya. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 April tahun berikutnya.

**Gambar 4. Alur pelaporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi**



3. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
  - 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
  - 2. Gambaran Umum Strategi/Aksi/Indikator dan Pendanaan
  - 3. Pendokumentasian Praktik Baik
  - 4. Tantangan yang Dihadapi
  - 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
  - 1. Rekomendasi
  - 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran :
  - 1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
  - 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG.
  - 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
  - 4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 ini disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, secara bersama-sama dengan dikoordinasi oleh BAPPEDA Sulawesi Utara. Rancangan RAD PG ini merupakan operasionalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang berisi penajaman kegiatan bidang pangan dan gizi yang sudah ada serta mengisi gap kegiatan untuk mempercepat pencapaian tujuan RPJMD dan TPB/SDGs. RAD-PG yang disusun ini akan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, termasuk upaya konvergensi penurunan *stunting*.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 penting untuk dipedomani untuk tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang dibagi menjadi empat tujuan strategis yaitu:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan B2SA;
- b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial);
- d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi.

Pemantauan RAD-PG dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, dan evaluasi RAD-PG dilakukan pada paruh waktu/mid-term dan akhir periode. Pemanfaatan RAD-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi mitra non-pemerintah. Rancangan RAD-PG ini akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RAD-PG dengan prinsip dan pendekatan yang sama dalam menyusun aksi penajaman.



## Daftar Pustaka

- Arif, S, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020, Smeru Research Institute, Jakarta.
- Beal, Ty; Tumilowicz, Alison; Sutrisna, Aang; Izwardy, Doddy; dan Neufeld, Lynnette M. 2018. A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition* 14.
- Diana, Rian, dkk. 2013. Faktor Risiko Kegemukan pada Wanita Dewasa Indonesia. *Jurnal Gizi Pangan* 8(1),1-8.
- Mboy, Nafsiah 2012. Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Merupakan Suatu Kesatuan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20121121/316359/ketahanan-pangan-dan-perbaikan-gizi-merupakan-suatu-kesatuan/>
- Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

**BAB VII MATRIKS RANCANGAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2022-2026**

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>								
1.1	Peningkatan produksi pangan yang beragam	Meningkatkan pengembangan sentra produksi pangan unggulan yang beragam	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (3 27 03 1.01 01)	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun  Produksi Padi 790484 ton (2026);	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Bappeda
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Bappeda
			Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (2 10 03 1.01 01)	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Dokumen	Produksi jagung 1.543.683 ton (2026);  Produksi daging 4,9 juta ton (2024: RPJMN);  Produksi umbi-umbian 25,5	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN (2 10 03 7.03 01)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen	juta ton (2024: RPJMN);  - Produksi hortikultura unggulan daerah 73.436 ton (2026);	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (2 09 03 1.02 02)	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	- Peningkatan produksi buah-buahan 5,7% (2024: RPJMN);  - Peningkatan produksi sayuran 3,1% (2024: RPJMN)  - Penggunaan benih bersertifikat 80% (2024: RPJMN)	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Bappeda, Dinas Kesehatan
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (2 09 02 1.01 03)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan, Bappeda
		Meningkatkan produksi sayur, buah, pangan hewani, dan pangan lokal di setiap kab./kota	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (3 27 02 1.01 01)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (3 27 02 1.01 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan (3 27 02 1.02 03)	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG, BPOM
		Memperluas upaya pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta jaminan keamanan dan mutu pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PPPA, Bappeda, Dinas PMD
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	DKP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, BPOM, BULOG
		Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasyarakatkan kegiatan pemanfaatan pekarangan dengan meningkatkan penggunaan benih bersertifikat	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura (3 27 02 1.02 02)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan		Dinas Pertanian	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BULOG, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Memberdayakan peran perempuan untuk ikut dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas PPPA, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPOM, BULOG
1.2	Penyediaan pangan yang aman (dalam proses produksi)	Meningkatkan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	- Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan 89% (2023), 92% (2024), 96% (2025), 100% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Pangan, BULOG, DKP, Dinas Pertanian & Peternakan, Disperindag
		Menguatkan kapasitas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (3 27 04 1.04 02)	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	- Persentase makanan yang memenuhi	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		keamanan pangan asal tumbuhan		Jumlah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di Kab/Kota yang telah diverifikasi dan dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) oleh Pemerintah Provinsi	Tahun 2024: 15 Kab/Kota	syarat 86% (2024: RPJMN)	Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Bappeda
		Penguatan kapasitas pengawasan bagi Balai Veteriner dalam rangka keamanan pangan asal hewan	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (3 27 04 1.04 02)	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang		Dinas Pertanian dan Peternakan	BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan.
1.3	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan di provinsi/ kab/kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (2 09 02 1.01 01)	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun;</li> <li>- Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton</li> </ul>	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 03)	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	(2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 04)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Mengembangkan dukungan konstruksi lumbung pangan masyarakat di desa (LPMDes)	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (2 09 02 1.01 03)	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun;</li> <li>- Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN);</li> </ul>	Dinas Pangan	Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen ( <i>food loss</i> ); dan	Mengembangkan pertanian modern ( <i>smart farming</i> ) untuk mengurangi <i>food loss</i>	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasaran, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024: RPJMN);</li> <li>Ketersediaan Cadangan Pangan 275 ton per tahun;</li> <li>Ketersediaan protein hewani 2,9 juta ton (2024: RPJMN);</li> <li>Produksi jagung 1.543.683 ton (2026);</li> <li>Produksi daging 4,9 juta ton (2024: RPJMN);</li> </ul>	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (3 27 05 1.01 02)	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi umbi-umbian 25,5 juta ton (2024: RPJMN);</li> <li>Produksi hortikultura unggulan</li> </ul>		
		Menyediakan akses/bantuan informasi, komunikasi, dan teknologi kepada petani, nelayan, dan peternak terkait	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (2 09 03 1.01 01)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						daerah 73.436 ton (2026);		
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (3 27 07 1.02 02)	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	Produksi ikan 988.400 ton (2023); 1.007.792 ton (2024); 1.040.129 ton (2025); 1.073.460 ton (2026)	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan,DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Melakukan pendampingan produsen pangan dalam pengendalian <i>food loss</i> melalui peningkatan kapasitas	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh & Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha		Dinas Koperasi & UKM	Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, BULOG

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengentasan Kemiskinan (2 17 07 1.01 01)					
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (3 30 06 1.03 01)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, BULOG
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food loss</i>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (2 09 03 1.01 04)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, BPOM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5	Pengayaan nilai gizi sumber pangan melalui biofortifikasi	Menyusun peta jalan biofortifikasi pangan di Sulawesi Utara untuk	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024: RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda
		Mengembangkan biofortifikasi di berbagai komoditi pangan	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme (3 27 02 1.03 04)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	Luas lahan produksi beras biofortifikasi - 60.000 ha padi (2024: RPJMN);  Ketersediaan cadangan pangan 275 ton per tahun;	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda
			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (3 27 02 1.03 03)	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	Penggunaan benih bersertifikat - 80% (2024: RPJMN);  Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						untuk pangan yang dilepas 30 varietas unggul tanaman baru (2024: RPJMN)		
<b>Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman</b>								
2.1	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan;	Memanfaatkan panel harga pangan sebagai <i>early warning system</i> (EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan (2 09 03 1.01 01)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Balai Pusat Statistik, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (3 30 04 1.02 01)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan		Disperindag	Dinas Pangan, BULOG, BPOM, Balai Pusat Statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Perindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(2 09 03 1.01 04)					
		Meningkatkan jenis komoditi pangan yang didistribusikan Toko Tani Indonesia (TTI) mencakup pangan komoditas unggulan daerah (kelompok hewani dan hortikultura) dan pangan lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Perindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Kesehatan
2.2	Perluasan akses sistem informasi pasar dan harga pangan;	Menyusun prognosa ketersediaan produksi dan kebutuhan pangan	Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal (2 09 03 1.02 02)	Rencana kebutuhan pangan lokal	Dokumen kebutuhan pangan lokal pada 15 Kab /Kota	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM
			Pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi (2 09 03 1.02 04)	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	- Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Menambahkan informasi sayur dan buah sebagai komoditi yang ikut dipantau	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)	Jumlah dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Koperasi & UKM, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3	Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bidang pangan;	Membina UMKM/Koperasi/ BUMDes dalam pengembangan industri pangan lokal (PIPL) untuk peningkatan gizi kelompok rawan	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan. (2-09-03-1.01-05)	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Unit	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Dinas Koperasi & UKM, Disperindag, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas PMD, Dinas Perhubungan, BULOG
2.4	Pengembangan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan pemanfaatan jenis pangan yang beragam;	Mengembangkan mekanisme pemanfaatan beras biofortifikasi dan fortifikasi menjadi salah satu komoditas bantuan pangan non tunai (BPNT)	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (3 27 07 1.02 01)	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pertanian & Peternakan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, BULOG, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan keberagaman pangan dengan nilai gizi yang baik sebagai komoditas Kartu Sembako/ BPNT	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (1 06 05 1.02 01)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Sosial	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA
		Mengintegrasikan pelayanan gizi esensial pada program bantuan sosial untuk kelompok termarginalkan (perempuan, gelandangan, penyandang disabilitas, penyandang masalah hukum, terlantar, etnis minoritas)	Penyediaan Permakanan (1 06 04 1.01 01)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Sosial	Dinas Pangan, DKP, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PMD, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.5	Penyediaan dan penyaluran pangan untuk situasi darurat;	Revitalisasi/mengaktifkan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bekerja sama dengan supplier bahan pangan lokal di daerah masing-masing	Program Penanganan Kerawanan Pangan (2 09 04)	Persentase Kab/Kota penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Tahun 2024: 75%	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2 09 04 1.02 02)	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.6	Penumbuhan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana;	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengolah pangan lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%  Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan 10,03% (2023); 8,03% (2024); 6,03 (2025); 4,03% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, DKP, Dinas Pangan
		Mendampingi daerah rentan pangan prioritas 1-3 dalam perencanaan dan Penyusunan program untuk Ketahanan pangan dan gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan,Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2 09 04 1.02 02)	Persentasi kabupaten/kota rentan pangan prioritas 1-3 yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program untuk ketahanan pangan dan gizi	2024: 90%		Dinas Pangan	Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, BULOG, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Bappeda, DKP
2.7	Pengembangan sistem logistik pangan	Mengembangkan sistem logistik pangan melalui penguatan <i>supply chain ecosystem</i> berdasarkan kondisi daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Dinas Pangan	DKP, Disperindag, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3 25 06 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen		DKP	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Koperasi & UKM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan kerjasama industri <i>start up</i> dengan kelompok tani untuk distribusi pangan melalui jalur <i>e-commerce</i>	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (3 31 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Koefisien variasi harga pangan nasional (RPJMN) - Beras <5% - Cabai < 20% - Bawang Merah <17% - Telur Ayam <10% - Daging Ayam <10%	Disperindag	Dinas PU, Dinas Pangan, Bappeda,
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (3 30 07 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen		Disperindag	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Bappeda
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan (3 25 04 1.01 03)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen		DKP	Disperindag, BPOM, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, BULOG, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan	Dokumen		DKP	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, BPOM, BULOG,

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			25 06 1.01 03)	Skala Usaha dan Risiko				
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani (3 27 07 1.03 01)	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG
			Pendampingan Manajemen Koperasi Petani (3 27 07 1.03 02)	Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Laporan		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,
			Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani (3 27 07 1.03 03)	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani (3 27 07 1.03 04)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		Dinas Pertanian & Peternakan	Disperindag, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Koperasi & UKM, Dinas PMD, Dinas PPPA, DKP, BPOM, BULOG,
<b>Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)</b>								
3.1	penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dan pemantauan status gizi;	Mengintegrasikan sistem informasi pangan dan gizi (SIPG) dalam rangka penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di pusat dan daerah beserta pemanfaatannya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi PoU 5% (2024: RPJMN);</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 7%</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1 02 02 1.02 17)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (1 02 02 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (1 02 02 1.03 02)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	(2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (1 02 02 1.03 03)	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	- Prevalensi Obesitas >18 tahun 21,8% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (2 20 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP, Bappeda
3.2	Pemutakhiran status ketahanan dan kerentanan pangan setiap	Meningkatkan pemanfaatan peta rawan pangan	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (1 02 05 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN); - Prevalensi	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, DKP, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, Dinas Pertanian & Peternakan



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tahun;		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (2 09 03 1.04 03)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	FIES 4% (2024: RPJMN);  Persentase- Daerah Rentan Rawan Pangan 10,03% (2023); 8,03% (2024); 6,03 (2025); 4,03% (2026)	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (2 09 04 1.01 01)	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi (2 09 04 1.02 01)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, Dinas PMD, DKP

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.3	Edukasi pola konsumsi pangan perserorangan dan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini;	Meningkatkan kegiatan advokasi panganenganekaragaman konsumsi pangan	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);  Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN)  Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Pangan, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Pangan	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo & Statistik, DKP, Dinas Pertanian, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melaksanakan kegiatan kampanye "isi piringku menu khas daerah/pangan lokal" di wilayah kabupaten/kota melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia secara periodik	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/ta hun (2024:RPJMN)  Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/ta hun (2024:RPJMN)	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Dinas Pendidikan, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Apotik, IDI, Wartawan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	- Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026) - Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); - AKE 2.400	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, IDI, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	kkal/kapita/hari; 2023-2026);  - AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026)	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Apotik, IDI, Wartawan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (3 25 03 1.01 01)	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen		Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Wartawan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut (3 25 04 1.05 04)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (3 25 04 1.05 06)	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (3 25 06 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen		Dinas KP	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci pedoman gizi seimbang (PGS) ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (1 01 02 1.01 47)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	AKE 2.400 kkal/kapita/hari 2023-2026);	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 01)	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026) Prevalensi Stunting 15% (2023), 14%	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 02)	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen	(2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 03)	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku		Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (1 01 03 1.01 04)	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda
		Melakukan peningkatan kapasitas komunikasi perubahan perilaku antar individu bagi Tenaga Pendamping di Desa (TPG, KPM, PLKB, Pendamping PKH) untuk meningkatkan kepatuhan penerima manfaat menjadi 90%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, IDI, Pengusaha Apotik, Wartawan
			Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1 02 02 1.02 27)	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (1 02 05 1.03 01)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPOM, DKP, Dinas PMD, Dinas Pertanian & Peternakan
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator (1 04 02 1.02 04)	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang		Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan Capil &KB, Dinas PPPA, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/sele bgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN)</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ((1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024)</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Kependudukan Capil & KB
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi (1 06 02 1.02 01)	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024)</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13%</li> </ul>	Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi (1 06 02 1.02 02)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	(2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024)	Dinas Sosial	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & KB
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (2 16 02 1.01 02)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik (2 16 02 1.01 05)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
		Mengembangkan platform rujukan informasi bagi jurnalis dan media untuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026)	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN);	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Dinas Kominfo & Statistik, Dinas PPPA, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & KB
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (2.16.02.1.01.04)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN);	Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelayanan Informasi Publik (2 16 02 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
			Layanan Hubungan Media (2 16 02 1.01 07)	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, IDI, Pengusaha Kuliner, Wartawan, NGO
		Meningkatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dalam dalam pengendalian faktor risiko PTM melalui pola makan sehat, aktivitas fisik dan deteksi dini	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	BKSAUA, Kanwil kemenag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat & Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	BKSAUA, Kanwil kemenag, Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA, Dinas PMD

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan orientasi <i>agent of change</i> pencegahan penyakit tidak menular (PTM)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 02 02 1.02 11)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN );</li> <li>- Prevalensi obesitas pada penduduk &gt;18 tahun 21,8% (2024:RPJMN )</li> <li>- disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholders
			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (1 02 02 1.02 19)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda Dinas PMD
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.01 01)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, , Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.01 02)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.02 01)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Kominfo & Statistik, Bappeda, Dinas PMD
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (1 02 03 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, Dinas Sosial, IDI, Dinas PPPA, Wartawan, NGO
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik (2 16 02 1.01 10)	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Wartawan, NGO
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (2 16 03 1.02 09)	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		Dinas Kominfo & Statistik	Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, IDI, Wartawan, NGO



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan peran PKK dalam pendampingan keluarga untuk promosi aktivitas fisik, peningkatan konsumsi buah dan sayur, pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (1 02 02 1.01 24)	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)  Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (2 08 04 1.01 01)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (2 08 04 1.01 03)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Laporan		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas PPPA, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim	Laporan		Dinas PMD	Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil &

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (2 13 05 1.01 09)	Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Pendidikan
3.4	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pencantuman informasi kandungan kadar gula, garam, lemak (GGL) dalam produksi pangan olahan dan siap saji	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
		Meningkatkan Sosialisasi Keamanan dan Mutu Pangan Jajanan Anak Sekolah	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	- Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN);	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PPPA, BPOM, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PPPA
3.5	Peningkatan konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral bersumber sayur dan buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu	Mengembangkan konsep isi piringku dengan pangan lokal di kab/kota	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 02 1.01 46)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Dinas Pendidikan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan;		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	kg/kapita/tahun (2026)  Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024:RPJMN);	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN);  Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024:RPJMN)	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.01 02)	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (2 09 03 1.01 06)	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		Dinas Pangan	DKP, Dinas Pertanian & Peternakan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD
		Mengembangkan peta jalan diversifikasi pangan untuk peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Bappeda, BULOG, BPOM
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (2 09 03	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		Dinas Pangan	Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Dinas PPPA, Disperindag, Dinas Kependudukan Capil &

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1.01 03)					KB, Dinas Sosial
3.6	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Air Susu Ibu (MP-ASI) berbasis pangan lokal;	Membina kabupaten/kota untuk menetapkan regulasi mengenai ASI Eksklusif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (1 02 02 1.02 03)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) (2 14 04 1.01 09)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Dokumen		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
			Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (2 14 04 1.01 14)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda
			Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (2 14 04 1.01 15)	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Unit		Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas PMD, Bappeda



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan aksesibilitas terhadap makanan tambahan berbahan dasar pangan lokal	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1 02 02 1.01 21)	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1 02 02 1.01 22)	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Bappeda
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (2 09 03 1.04 01)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		Dinas Pangan	Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, DKP, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD
3.7	Peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat	Mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		suplementasi gizi (makanan tambahan, TTD, dan kapsul vit. A) untuk mencapai cakupan target sasaran sebesar 90 % pada tahun 2026	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (1 02 02 1.02 18)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mendorong pemanfaatan pemanfaatan <i>RUTF (Ready to Use Therapeutic Food)</i> berbahan dasar pangan lokal produksi dalam negeri dalam pelayanan gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				
		Meningkatkan sasaran pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-59 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA
		Memperluas implementasi pemberian bubuk tabur gizi kepada anak umur 6-24 bulan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	terpilah berdasarkan jenis kelamin;  Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan tata kelola pelayanan gizi pada situasi darurat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1 02 02 1.02 01)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024:RPJMN);</li> <li>- Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas PMD, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
		Meningkatkan kapasitas puskesmas dalam melaksanakan pelayanan terpadu (Pandu) PTM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1 02 02 1.02 11)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Dikbud, Dinas PP dan PA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam Gerakan Lawan Obesitas dan pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) di desa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (1 02 05 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpisah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 02)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PMD	Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2 13 05 1.01 03)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Dinas PMD	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Perindag, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengintegrasikan pengendalian dampak COVID-19 terhadap pedoman yang berkaitan dengan perbaikan gizi yang diterbitkan pemerintah pusat yang digunakan di daerah	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (1 02 02 1.02 01)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas PMD, Dinas Pangan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PPPA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Naker, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, BPOM, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda,
		Memberikan perlindungan gizi kepada pekerja perempuan (sektor swasta) terdampak pandemi COVID-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dinas Kesehatan	Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Naker, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PPPA, BPOM, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda,

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 03)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Pengakat Daerah	berdasarkan jenis kelamin;	Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 03 1.01 02)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah		Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi (2 08 03 1.03 03)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang		Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Naker, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Sosial, Dinas PMD, Bappeda, BPOM
3.8	Pengendalian pemborosan pangan ( <i>food waste</i> );	Menginisiasi gerakan masyarakat mengurangi <i>food waste</i>	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi (2.11.08.1.01.03)	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kominfo
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (2.11.08.1.01.04)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindag, Dinas Kominfo

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan <i>imperfect</i>	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (3 30 07 1.03 03)	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Perindag	Dinas Pertanian, Dinas Koperasi & UKM, Dinas Energi & SDM, Dinas Perhubungan
		Melakukan kerjasama kesepahaman (MoU) dengan industri pangan dan perhotelan untuk mengendalikan <i>food waste</i>	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata (3.26.02.1.04.04)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Pariwisata	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM, Dinas Koporas & UKM, Dinas Energi & SDM, BULOG
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan <i>food waste</i>	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri (3 26 03 1.01 03)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN);	Dinas Pariwisata	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM, Dinas Koporas & UKM, Dinas Energi & SDM, BULOG

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.9	Penambahan jenis dan komposisi zat gizi (fortifikasi) pada pangan tertentu sebagai pengayaan nilai gizi	Menyusun peta jalan fortifikasi pangan di Sulawesi Utara untuk perbaikan kebijakan yang ada	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (2 09 02 1.01 04)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	<p>Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi 100% (2024:RPJMN);</p> <p>Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</p>	Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, BPOM, Bappeda, Dinas Energi & SDM
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, BPOM, Bappeda, Dinas Energi & SDM
		Mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memproduksi fortifikan dan kernel fortifikasi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (3 31 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Dinas PU, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melaksanakan Pengawasan terpadu lintas OPD dalam pengawasan dan pembinaan implementasi pangan fortifikasi	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (3 31 02 1.01 06)	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		Dinas Perindag	Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Pangan, Dinas PU, Bappeda
		Melaksanakan pengawasan implementasi aturan pangan berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi (2 09 05 1.01 01)	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026)	Dinas Pangan	Disperindag, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
				Jumlah produsen minyak goreng sawit yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi minyak goreng sawit yang mengandung vitamin A atau provitamin A sesuai SNI terkini yang berlaku (2021)	Tahun 2022: semua produsen minyak goreng skala besar termasuk <i>repacker</i>	disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Perindag	BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.10	Peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan.	Mendorong ditetapkannya minuman berpemanis dalam kemasan sebagai barang kena cukai baru		Jumlah produsen tepung terigu yang dibina dan diawasi dalam rangka pengimplementasian produksi tepung terigu berfortifikasi sesuai SNI terkini yang berlaku (2021)	Tahun 2022: semua produsen tepung terigu skala besar termasuk <i>repacker</i>	Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Perindag	BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (5 02 02 1.02 01)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		Badan Pendapatan Daerah	Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Pangan, BPOM, Dinas Perindag
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Perindag



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mendorong ekstensifikasi pilihan lebih sehat"/healthy choice pangan siap saji	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Lokal	Persentase makanan memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)  Prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) – disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas Pangan	BPOM, Dinas Perindag, , Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tujuan Strategis 4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi</b>								
4.1	Penguatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi pangan dan gizi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Membentuk forum koordinasi lintas sektor/ pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev yang terintegrasi dengan forum koordinasi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Bappeda	Perangkat Daerah yang terlibat dalam Forum Koordinasi Penurunan Stunting

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 07)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		Bappeda	Perangkat Daerah yang terlibat dalam Forum Koordinasi Penurunan Stunting

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengintegrasikan RAD-PG di dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> (aksi #2)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (5 01 02 1.01 02)	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
		Memperkuat peran Bappeda dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADPG di	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kabupaten/Kota	Daerah Bidang SDA (5 01 03 1.02 08)	Jumlah Kab/Kota mendapatkan pendampingan dalam penyusunan RAD-PG sesuai pedoman terkini	Tahun 2024: 15 Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</li> </ul>	Bappeda	Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan
4.2	Penguatan peran sektor nonpemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi di provinsi dan kab/kota	Meningkatkan koordinasi jejaring lintas pemangku kepentingan (non-pemerintah) dalam <i>scaling up</i> program pangan dan gizi di	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi (2 12 04 1.02 04)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14%</li> </ul>	Dinas Kependudukan Capil & KB	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		provinsi dan kab/kota	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (5 01 03 1.01 06)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	(2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Bappeda	
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (2 16 02 1.01 08)	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen		Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan (2 09 02 1.01 05)	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen		Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melibatkan sektor swasta, industri dan perdagangan pangan untuk aktif melakukan kegiatan komunikasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> .	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (1 02 05 1.02 01)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); - AKE 2.400 kkal/kapita/hari (2023-2026); - AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026); - Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026) - Konsumsi daging 14,6	Dinas Kesehatan	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	kg/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024: RPJMN); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.3	Penguatan dimensi gender dan peran perempuan dalam kelembagaan pangan dan gizi	Melakukan peningkatan kapasitas PUG dan PURG di institusi terkait pembangunan pangan dan gizi di provinsi dan kab/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 01)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026);  - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;	Dinas PPPA	Bappenas, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.01 04)	Jumlah D/B/Biro bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga yang meningkat kapasitas PUG/PPRG-nya	Tahun 2023: 21 D/B/Biro yang terlibat dalam RAD PG Tahun 2024: 34	- Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Sosial, Bappeda

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 01)	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi <i>Wasting</i> 7% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin	Dinas PPPA	Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Jumlah kab/kota yang memberikan penguatan kapasitas terhadap lembaga masyarakat terkait PUG dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)	Tahun 2024: 15 kab/kota			
		Peningkatan peran perempuan dalam implementasi pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, peningkatan aktifitas fisik dan deteksi dini	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 02)	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas hidup sehat untuk mengendalikan obesitas dan PTM	Orang	Prevalensi Obesitas pada penduduk >18 tahun 21,8% (2024:RPJMN) - <i>disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin</i>	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas Pangan, Dinas PMD, Dinas Sosial
		Mengembangkan mekanisme pengawasan sosial oleh organisasi perempuan, masyarakat dan media terhadap kebijakan ASI Eksklusif, susu	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (2 08 02 1.03 03)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026); - Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13%	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas Kependudukan Capil & KB, Dinas PMD, Dinas Sosial

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		formula, dan produk bayi lainnya yang berlaku				(2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;  - Prevalensi Wasting 7% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin		
4.4	Penguatan regulasi untuk ketahanan pangan dan gizi	Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan (5 05 02 1.01 13)	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 100%;	Badan Litbang	Dinas Pangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN/ATR, Dinas PMD, Bappeda
			Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	- Luas lahan Produksi beras biofortifikasi 200.000 ha;		
			Penetapan	Jumlah Dokumen	Dokumen	- Ketersediaan cadangan	Dinas	Dinas Pertanian, Dinas

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (1 03 12 1.01 03)	Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		pangan 275 ton per tahun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPN/ATR, Dinas PMD
		Menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan produk inovasi pangan yang layak (memenuhi persyaratan gizi, keamanan, acceptibilitas, harga, shelf live) untuk diadopsi ke dalam pelayanan gizi	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN)</li> <li>- Skor PPH 94,5 (2023), 94,7 (2024), 95 (2025), 95 (2026)</li> </ul>	Dinas Pangan	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, KKP, BPOM, Badan Litbang
4.5	Pengembangan <i>platform</i> penelitian dan pengembangan di bidang pangan dan gizi	Meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk pencegahan dan penanganan <i>food loss</i> dan <i>food waste</i> termasuk inovasi <i>smart farming</i>	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024: RPJMN);</li> <li>- Prevalensi FIES 4% (2024: RPJMN)</li> </ul>	Badan Litbang	Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, DKP, BPOM

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan kerjasama dengan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/sele bgram lokal untuk kampanye perubahan perilaku	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (1 02 02 1.02 09)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi POU 5% (2024:RPJMN)</li> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Persentase makanan yang memenuhi syarat 86% (2024:RPJMN)</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo & Statistik, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Kependudukan Capil & BK, Dinas PPPA

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Melakukan kajian <i>gap analysis</i> program pengendalian defisiensi zat gizi mikro di Sulawesi Utara	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (5 05 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Badan Litbang	Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pangan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Menyusun kajian yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pemberian suplementasi multi gizi mikro	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (5 05 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pangan



No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mengembangkan <i>community based data</i> untuk pemetaan dan evaluasi masalah gizi mikro di tingkat kabupaten/kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (1 02 02 1.02 06)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> </ul>	Dinas Kesehatan	Bappeda, BPS
		Mengembangkan biofortifikasi dan fortifikasi di berbagai komoditi pangan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevalensi <i>Stunting</i> 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;</li> <li>- Prevalensi</li> </ul>	Badan Litbang	Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Dinas Infokom & Statistik

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Wasting 9% (2024: RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;		
		Menyelenggarakan forum daerah penelitian dan pengembangan pangan dan gizi secara berkala	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (5 05 02 1.03 05)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	- Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan - sebanyak 15 hasil riset (2024);	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan,
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (5 05 02 1.03 04)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	- Teknologi yang diterapkan oleh petani 80-95% (2024: RPJMN)	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan
		Menembangkan inovasi pemanfaatan pangan lokal untuk perbaikan konsumsi gizi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (5 05 02 1.04 01)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang	Dokumen	- Prevalensi Stunting 15% (2023), 14% (2024), 13% (2025), 12% (2026) disajikan	Badan Litbang	Bappeda, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Dinas Pertanian dan Peternakan

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		keluarga		Teknologi dan Inovasi		terpilah berdasarkan jenis kelamin; - Prevalensi <i>Wasting</i> 9% (2024:RPJMN) - disajikan terpilah berdasarkan jenis kelamin;		
		Melakukan kajian literasi gizi untuk mendukung kebijakan perubahan perilaku makan B2SA yang juga memuat pemetaan promosi perubahan perilaku cegah <i>stunting</i> yang sudah beredar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (2 09 03 1.04 02)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	- Konsumsi ikan 67,5 kg/kapita/tahun (2023); 68 kg/kapita/tahun (2024); 70 kg/kapita/tahun (2025); 72 kg/kapita/tahun (2026) - Konsumsi daging 14,6 kg/kapita/tahun (2024); - Konsumsi protein asal ternak 11 gram/kapita/tahun (2024);	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Bappeda, Balitbang

No	Strategi	Aksi	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Target Bidang Pangan dan Gizi dalam RPJMD 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 yang Didukung	OPD Penanggung Jawab	Pemangku Kepentingan yang terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						- Konsumsi sayur dan buah 316,3 gram/kapita/tahun (2024);		
		Mengembangkan jejaring laboratorium bidang pangan dan gizi untuk pembaharuan Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)/Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) sesuai kondisi Indonesia	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (2 09 05 1.01 03)	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	- Skor PPH 95,2% (2024); - AKE 2.400 kal/kapita/hari (2023-2026); - AKP 63 gram/kapita/hari (2023-2026);	Dinas Pangan	Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BPOM, Bappeda

## BAB VIII MATRIKS DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
1	CARGILL INDONESIA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Budidaya Jamur Tiram Putih dengan Media sabut kelapa	Pelatihan bagi kelompok perempuan	Orang	Produksi jamur Tiram putih 50kg per hari	- Training peningkatan kualitas jamur tiram putih, - Pelatihan pembuatan produk turunan jamur	Sertifikasi Halal dan BPOM	Exit Program	-	1.038.075.000	CSR PT. Cargill Indonesia	Sulawesi Utara
2	CARGILL INDONESIA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Program Produksi Minyak Kelapa Yang Berkelanjutan	Memberikan peningkatan ekonomi petani melalui peningkatan produktifitas dan praktek pertanian yang berkelanjutan	Orang	200 petani dapat tersertifikasi	Penambahan Jumlah petani yang tersertifikasi	Penambahan jumlah petani yang tersertifikasi	Penambahan jumlah petani yang tersertifikasi	-	1.653.286.725	CSR PT. Cargill Indonesia	Sulawesi Utara
3	PT. BANK SULUTGO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Pembangunan <i>watertower</i> di universitas klabat	Volume air	Liter	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	750.000.000	TJS BSG	Sulawesi Utara
4	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	BRI Peduli Woman Communi-Tree Chapter II	Pupuk	Benih Bunga	-	-	-	-	-	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
5	PT. PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL MANADO	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pegadaian Green Live Action	Bibit	Buah	Pembangunam infrastruktur untuk fasilitas umum	-	Pengembang an Tempat Usaha dengan program kemitraan	Program Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Pemberdaya an Mahasiswa Berprestasi untuk mendapat kan pelatihan	7.000.000.000	Pegadaian Pusat	Sulawe si Utara
6	PT. BANK SULUTGO	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pembangunan Water Tower Universitas Klabat	Air Bersih	Liter	40.000 liter	60.000 liter	60.000 liter	80.000 liter	80.000 liter	-	CSR Perusahaan	Sulawe si Utara
7	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Penyusunan dan pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita tersusun dan tersahkan	Dokumen	Pengesahan peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya perikanan gurita	-	-	-	-	87.000.000	Blue Ventures	Sulawe si Utara
8	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pengintegrasian rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita dengan RPJMDesa	Rencana pengembangan sumber daya perikanan gurita terintegrasikan dengan RPJMDesa	Dokumen	Pelatihan tim penyusun RPJMDesa	- Penyusunan draft RPJMDesa - Pengesahan draft RPJMDesa	-	-	-	135.000.000	Blue Ventures	Sulawe si Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
9	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (Esensial)	Dimulainya atau diperluasnya penutupan sementara perikanan gurita	Penutupan sementara perikanan gurita dimulai atau diperluas	Siklus penutupan sementara perikanan gurita	- Desa Bulutui melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 2 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita	- Desa Bulutui melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Gangga Satu melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita - Desa Likupang Dua melakukan 1 siklus penutupan sementara perikanan gurita	-	-	-	84.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
10	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pembentukan kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC) terbentuk	Kelompok pengelola Rumah Boboca (Temporary Closure - TC)	Kelompok Batu Woka Sejahtera terbentuk di Desa Likupang Dua	-	-	-	-	96.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
11	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pengembangan sistem pengelolaan Rumah Boboca	Sistem pengelolaan Rumah Boboca yang dapat diimplementasikan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Sistem pengelolaan Rumah Boboca	Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	Pelatihan sistem pengelolaan Rumah Boboca untuk kelompok Napo Ila Indah, Sawang Indah, dan Batu Woka Sejahtera	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
12	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengambilan data perikanan gurita partisipatif	Data perikanan gurita terambil secara partisipatif	Pengumpul gurita di tingkat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> <li>- Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> <li>- Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Bulutui melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> <li>- Desa Gangga Satu melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> <li>- Desa Likupang Dua melakukan pengambilan data perikanan gurita partisipatif</li> </ul>	-	-	-	472.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
13	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengembangan unit usaha kelompok pengelola Rumah Boboca ( <i>temporary closure</i> )	Kelompok pengelola Rumah Boboca ( <i>temporary closure</i> ) memulai unit usahanya sendiri	Unit usaha kelompok pengelola Rumah Boboca ( <i>temporary closure</i> )	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan gurita	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan hasil perikanan gurita	-	-	-	292.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara



No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
14	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Kajian kebijakan perikanan untuk mendukung penyuaaraan dan integrasi gurita sebagai unggulan	Adanya dokumen kajian kebijakan perikanan gurita	Dokumen kajian	Draft awal kajian kebijakan perikanan gurita	Draft akhir kajian kebijakan perikanan gurita	-	-	-	25.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
15	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pemberian Bantuan <i>Sound System</i> GMIM Pasino'owan Koreng Wilayah Tareran 1	<i>Sound System</i>	<i>Sound System</i>	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
16	BANK BRI WILAYAH MANADO	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pemberian Bantuan <i>Sound System</i> GMIM Tiberias Kinjar	<i>Sound System</i>	<i>Sound System</i>	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	Pemberian informasi yang berhubungan dengan pangan dan gizi	-	Kantor Pusat	Sulawesi Utara
17	YAYASAN BUMI TANGGUH (YBT)	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Fasilitasi penetapan kawasan konservasi laut daerah	Peta penetapan kawasan konservasi laut daerah	Kawasan /de sa	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	-	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	Lanjutan pendampingan masyarakat desa lokasi kawasan konservasi laut daerah dan penguatan Pokmaswas	250.000.000	WCS dan sumber lain yang tidak mengikat	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
18	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pembentukan kelompok simpan di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan terbentuk di Desa Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua	Kelompok simpan	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mulai kegiatan menabung	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua meneruskan kegiatan menabung	-	-	-	78.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
19	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Peningkatan kapasitas kelompok simpan	Kelompok simpan mampu secara mandiri mengelola kelompoknya	Kelompok simpan yang mandiri	Kelompok simpan di Bulutui, Gangga Satu, dan Likupang Dua mampu mengelola kelompoknya secara mandiri	-	-	-	-	82.500.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara
20	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Menyelenggarakan forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan Pemprov dengan pengelolaan perikanan masyarakat	Forum dialog provinsi melalui sektor perikanan dan kelautan serta sektor-sektor yang relevan lainnya untuk harmonisasi pengelolaan ruang laut dan perikanan Pemprov dengan pengelolaan perikanan masyarakat terselenggara	Forum dialog di tingkat provinsi	Diskusi revisi RZWP3K dan integrasinya ke dalam RTRWP Sulawesi Utara	-	-	-	-	60.000.000	Blue Ventures	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
21	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong)	Data transdisipliner terdiri dari komponen sosio-ekologi utama, termasuk perikanan demersal skala kecil, pengurangan risiko bycatch duyung di titik-titik panas (tumpang tindih antara daerah penangkapan ikan dan daerah penampakan dugong) terkumpul	Set data sosio-ekologi	Data sosio-ekologi terkumpul	-	-	-	-	7.700.000	CEPF	Sulawesi Utara
22	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyusunan draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan ko-kreasi	Draf rencana pengelolaan CB-MPA yang dibuat dengan pendekatan ko-kreasi	Draf rencana pengelolaan CB-MPA	Draft rencana pengelolaan CB-MPA	-	-	-	-	28.900.000	CEPF	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
23	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyepakatan mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur melalui mekanisme Dana Desa disepakati	Mekanisme insentif perikanan demersal skala kecil berkelanjutan di Bulu dan Bukide Timur	Pembentukan Pokdarwis di Bukide Timur dengan pembiayaan dari Dana Desa	-	-	-	-	5.400.000	CEPF	Sulawesi Utara
24	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya teripang di Bulu	Sarana dan prasarana budidaya teripang tersedia di Bulu	Paket sarana dan prasarana budidaya teripang	Sarana dan prasarana budidaya teripang	-	-	-	-	3.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
25	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Membangun kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Terbangunnya kapasitas masyarakat di Bulu untuk budidaya teripang	Orang anggota kelompok/koperasi	Pelatihan pengolahan hasil budidaya teripang	-	-	-	-	31.100.000	CEPF	Sulawesi Utara
26	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Penyiapan rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang	Rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang disiapkan	Rencana bisnis teripang	- Draft rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang - Penyepakatan draft rencana bisnis dan jaringan jual beli teripang oleh anggota koperasi	-	-	-	-	23.100.000	CEPF	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
27	YAPEKA SULAWESI UTARA	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi	Pembangunan sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Adanya sistem pengelolaan pengetahuan ekosistem lamun dan pesisir	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara	Nota kesepahaman dengan Politeknik Negeri Nusa Utara dalam hal penelitian ekosistem pesisir dan kerja praktek (magang) mahasiswa	-	-	-	-	19.200.000	CEPF	Sulawesi Utara
28	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait	Informasi sosio-ekologis yang relevan untuk formalisasi CB-MPA dikumpulkan, dikomunikasikan dan dipublikasikan di saluran yang relevan	Naskah akademik	Naskah akademik	Naskah akademik	-	-	-	9.500.000	CEPF	Sulawesi Utara
29	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi	Informasi dugong menggunakan kuesioner terstandarisasi terkumpul	Set data	-	-	-	-	-	10.000.000	IKI	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
30	YAPEKA SULAWE SIUTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi karbon biru dalam sedimen lamun	Informasi karbon biru dalam sedimen lamun terkumpul	Set data	- Sampel sedimen terkumpul - Sampel sedimen teranalisis	Penulisan laporan terkait data karbon biru	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
31	YAPEKA SULAWE SIUTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV	Informasi jasa lingkungan ekosistem lamun menggunakan metode B/RUV terkumpul	Set data	- Footage terkumpul - Footage teranalisis	Penulisan laporan terkait data jasa lingkungan ekosistem lamun	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
32	YAPEKA SULAWE SIUTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi populasi dugong melalui <i>survey drone</i>	Informasi populasi dugong melalui <i>survey drone</i> terkumpul	Set data	- Pilot drone terlatih dan tersertifikasi APDI - Pilot drone terlatih dalam metode pengambilan sampel dan rencana terbang penelitian	- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait <i>survey drone</i>	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara
33	YAPEKA SULAWE SIUTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Pengumpulan informasi lamun melalui metode <i>seagrasswatch</i>	Informasi lamun melalui metode <i>seagrasswatch</i> terkumpul	Set data	Latihan pengambilan data menggunakan metode <i>seagrasswatch</i>	- Data sampel terambil - Data teranalisis - Penulisan laporan terkait <i>seagrasswatch</i>	-	-	-	50.000.000	IKI	Sulawesi Utara

No	Nama Lembaga /Perusahaan	Tujuan Strategis yang disasar	Nama Kegiatan TJSL	Output Kegiatan TJSL	Satuan Output	Target Output 2022	Target Output 2023	Target Output 2024	Target Output 2025	Target Output 2026	Indikatif alokasi anggaran untuk 5 Tahun (2022 s.d. 2026) dalam Rp.	Sumber Pendanaan	Lokasi
34	YAPEKA SULAWESI UTARA	Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Inisiasi model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut	Model usaha budidaya spirulina di Desa Tarabitan yang berkontribusi terhadap usaha perlindungan laut terinisiasi	Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama penggunaan lahan untuk kolam spirulina</li> <li>- Workshop sosialisasi budidaya spirulina</li> <li>- Kolam budidaya spirulina terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan pengelolaan budidaya spirulina</li> <li>- Pelatihan pasca panen budidaya spirulina</li> <li>- Pelatihan pemasaran spirulina</li> </ul>	-	-	-	70.000.000	IKI	Sulawesi Utara

## **LAMPIRAN : EXECUTIVE SUMMARY/RINGKASAN STUNTING SULAWESI UTARA**

Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sedangkan pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2.00 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3.00 SD (severely stunted). Jadi dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Oleh sebab itu untuk mengukur status gizi balita, kondisi keluarga rentan dan capaian kinerja pemerintah, maka terdapat beberapa metode pengumpulan data yang telah dilakukan secara langsung dilapangan maupun melalui hasil survei oleh lembaga pemerintah terkait kondisi prevalensi stunting di Sulawesi Utara, sebagai berikut.



**A. elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM)**

Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) merupakan pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik untuk merekam data individu dan hasil penimbangan, terutama di Posyandu serta mengolah hasil input data tersebut menjadi status gizi by name by address.

Penggunaan e-PPGBM bertujuan agar tenaga pelaksana gizi dan pemangku kebijakan di daerah lebih mudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah mereka untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan, baik secara komunitas maupun individu. Sebagaimana kita sadari bersama, bahwa dalam upaya perbaikan gizi masyarakat, khususnya gizi anak, dibutuhkan program multi sektoral yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting adanya ketersediaan data secara akurat dan berkelanjutan. Rekap hasil pengukuran e-PPGBM posisi bulan februari tahun 2023 se-Sulawesi Utara disajikan pada table berikut:

REKAPAN PENGUKURAN DAN PREVALENSI BALITA STUNTING PROVINSI SULAWESI UTARA PENGUKURAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2023									
NO	KABUPATEN/KOTA	SASARAN PROYEKSI	ENTRY SASARAN	ENTRY PENGUKURAN	%	STUNTING	%	WASTING	%
1	BOLAANG MONGONDOW	21.721	15.892	15.120	95,14	97	0,64	205	1,36
2	MINAHASA	21.974	18.566	8.045	43,33	129	1,60	88	1,09
3	KEPULAUAN SANGIHE	8.198	6.688	6.522	97,52	213	3,27	267	4,09
4	KEPULAUAN TALAUD	7.206	5.322	3.829	71,95	409	10,68	229	5,98
5	MINAHASA SELATAN	14.818	14.190	12.878	90,75	351	2,73	55	0,43
6	MINAHASA UTARA	15.634	12.307	10.560	85,80	358	3,39	205	1,94
7	BOLAANG MONGONDOW UTARA	7.216	5.221	2.231	42,73	97	4,35	139	6,23
8	KEPULAUAN SITARO	4.155	3.462	3.421	98,82	20	0,58	49	1,43
9	MINAHASA TENGGARA	8.646	7.941	6.931	87,28	120	1,73	81	1,17
10	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7.064	5.445	5.442	99,94	195	3,58	323	5,94
11	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5.926	5.910	4.651	78,70	326	7,01	180	3,87
12	KOTA MANADO	30.714	19.959	14.572	73,01	79	0,54	126	0,86
13	KOTA BITUNG	19.766	14.603	8.137	55,72	261	3,21	249	3,06
14	KOTA TOMOHON	7.052	4.095	3.941	96,24	10	0,25	5	0,13
15	KOTA KOTAMOBAGU	10.477	7.285	5.127	70,38	205	4	79	1,54
	SULAWESI UTARA	190.567	146.886	111.407	75,85	2.870	2,58	2.280	2,05

Adapun hasil pelaporan dari masing-masing puskesmas ke provinsi tersebut menunjukkan angka prevalensi stunting di Sulawesi Utara tahun 2023 posisi bulan Februari sebesar 2,58%, atau berjumlah 2.870 balita. Angka tersebut merupakan hasil pengukuran balita dari 75,85% balita yang telah terdata, atau berjumlah 111 ribu balita telah diukur dari 146 ribu balita yang telah terdata.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri pemerintah Sulawesi Utara dimana hasil pengukuran balita belum 100% terukur dari total jumlah balita yang terdata, sehingga angka prevalensi yang muncul tersebut belum cukup menggambarkan kondisi senyatanya di lapangan.

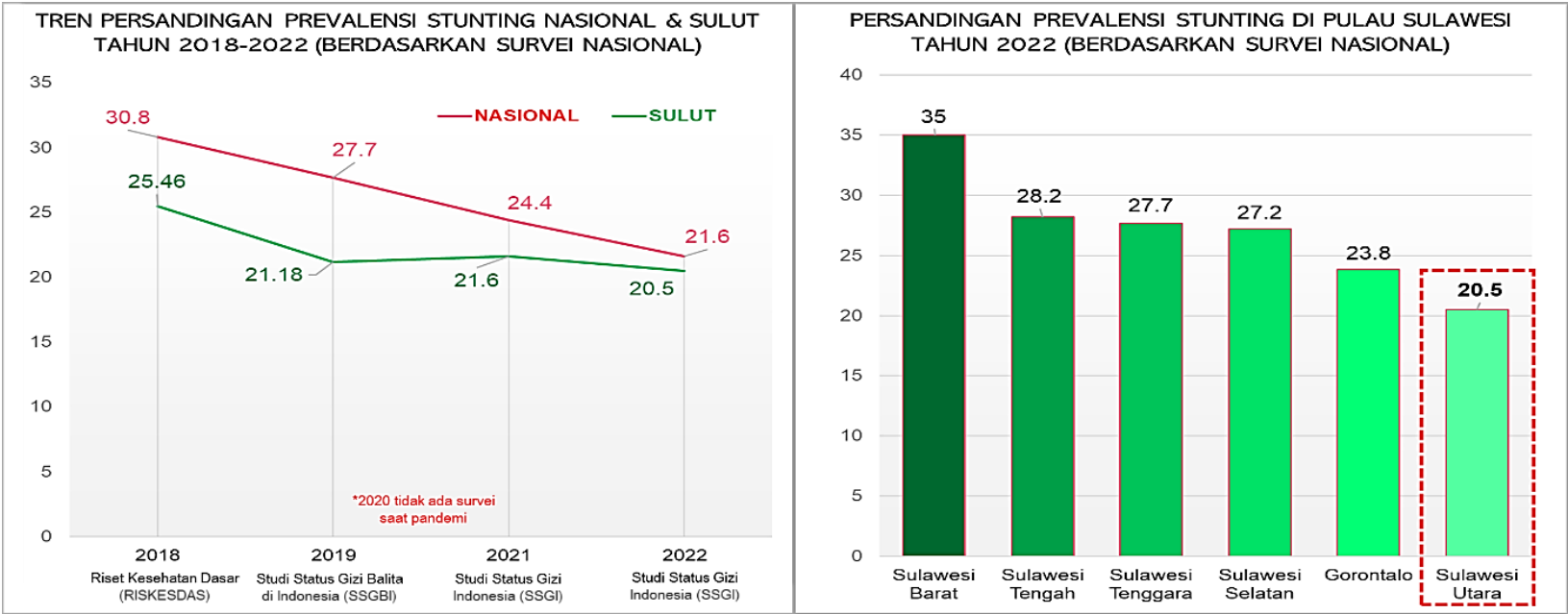
Oleh sebab itu, perlu adanya perluasan jangkauan pendataan dan pengukuran balita, kolaborasi program strategis yang tepat sasaran serta berdampak langsung pada intervensi spesifik dan sensitive secara optimal, efektif dan harmonis dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Niyur melambai.

## **B. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)**

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan status gizi balita (stunting, wasting, dan underweight) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Studi yang dilakukan sejak tahun 2019 ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dan didukung oleh Sekretariat Wakil Presiden RI. Saat ini, pelaksanaan SSGI menjadi amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 dimana Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk mempublikasikan data prevalensi stunting kabupaten/kota setiap tahunnya.

Data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita serta dilakukan oleh enumerator terlatih yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. SSGI dilakukan secara tahunan sejak 2019 dengan pengecualian pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Meskipun sama-sama berbasis survei, RISKESDAS berbeda dengan SSGI karena pengumpulan data RISKESDAS dilakukan setiap lima tahun sekali serta menggunakan sampel rumah tangga umum, tidak terbatas pada rumah tangga dengan balita.

Berdasarkan hasil survei berskala nasional, yakni Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Stunting di Sulawesi Utara mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari angka 25,46% di Tahun 2018 menjadi 20,5% di Tahun 2022 atau berkurang sebesar 4,96% dalam 4 Tahun terakhir serta terus berada dibawah rata-rata nasional. Jika dilihat berdasarkan kondisi wilayah pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara menjadi daerah dengan prevalensi stunting yang paling rendah ditahun 2022.



Berdasarkan hasil rilis atau publikasi dari ke dua data tersebut, yakni antara SSGI dan e-PPGBM terdapat perbedaan sifat yang menentukan perbedaan kegunaan data. SSGI dan Riskesdas digunakan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan intervensi gizi di tingkat nasional dan daerah. Sementara, data e-PPGBM berguna untuk memonitor pertumbuhan balita setiap bulannya dan termasuk ke dalam surveilans program gizi. Data e-PPGBM juga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penetapan sasaran program gizi di daerah karena bersifat real-time. Penggunaan ketiga data ini harus digunakan secara tepat sesuai fungsinya.

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.

### **C. Cakupan Layanan Essensial dan Supply Daerah**

Cakupan layanan essensial adalah layanan yang diberikan atau diterima langsung oleh sasaran intervensi, contohnya yaitu remaja, Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS) Ibu Hamil Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita) dan Keluarga Berisiko. Sedangkan Cakupan layanan supply adalah layanan untuk mendukung atau untuk memastikan tercapainya sasaran intervensi berdasarkan target OPD Pengampunya.

Adapun berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023 terkait penyajian capaian cakupan layanan essensial dan supply daerah, yang telah dipaparkan oleh pemerintah kab/kota di Sulawesi Utara dapat dilihat pada table berikut:

### CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022 – PER KAB/KOTA DI SULAWESI UTARA

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022																
1	Persentase Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	83,76%	86,5%	92.02%	46%	35,36%	62.16%	70,40%	76,39%	34.04%	51.6%	60,72%	87.71%	100%	0.16%	19,85%
2	Persentase Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	NA	NA	35%	NA	NA	NA	70,40%	NA	34.08	67.6%	1,05%	0.50%	NA	0.16%	0
3	Persentase Calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	NA	100%	NA	1.90%	NA	56.90%	70,40%	NA	71.40%	85.4%	NA	NA	19.04%	NA	40%
4	Persentase Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	NA	100%	65%	1.90%	1,30%	56.90%	40%	85,21%	71.40%	NA	100%	78.44%	0.4%	100.00%	60%
5	Persentase Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	NA	100%	65%	1.90%	0,80%	56.90%	40%	89%	67.5	NA	100%	78.44%	100%	100.00%	40%
6	Persentase Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	NA	67,82%	35%	1.90%	90%	56.90%	40%	80%	NA	NA	100%	5.28%	100%	100.00%	40%
7	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	NA	NA	NA	30%	80%	10.55%	25%	100%	NA	NA	100%	NA	100%	645 orang	5.592 KPM
8	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	9,06%	NA	NA	35%	80%	0.01	30%	100%	80.50%	NA	34,08%	NA	100%	NA	8.574 KPM
9	Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	23,58%	NA	NA	45%	55%	14.99%	75%	100%	65.30%	NA	100%	36.30%	100%	NA	17.092 KPM

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022																
10	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	98,6%	96.50%	100%	100%	100%	100%	92.00%	100%
11	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	100%	98%	100%	95.50%	83%	73%	97,30%	88,1%	71.40%	95%	100%	99.00%	99.60%	1030 ibu hamil	100%
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	22,70%	25,25%	24.83	27.24	1,54%	18.2	25,18%	18,48%	4.17%	27.10%	100%	16.63%	16.11%	13.50%	23.29
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	14,53%	8,19%	NA	14.15	10%	11.85	NA	13,35%	NA	0.23%	35,50%	3.33%	NA	45 kehamilan	4,50%
14	Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	74,99%	36%	51.84%	60.90%	90%	29.26%	22,90%	38,9%	30.20%	38.5%	59,06%	81.04	33.10%	47.00%	50,20%
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	100%	50%	NA	100%	90%	1417	16328 (84,1)	96,35%	95%	72.9%	100%	93.03%	100%	1688	100%
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	59,32%	100%	NA	100%	90%	5%	14%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	87,89%	89%	94.40%	81.60%	90%	4411	18039	79,83%	84.14%	74%	79,96%	98.03%	7485	14869	93,6
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	NA	100%	100%	100%	90%	228	122	96,35%	95.48%	100%	98,53%	93.63%	29%	489	100%
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	32,05%	89%	106.90%	3,552	36,82%	5692	6039 (90,3%)	97%	93.44%	89.6%	100%	67%	1289	3.405	110,50%
20	Persentase Keluarga yang Stop BABS	98,52%	100%	100%	96%	90%	92.59%	100%	92,62%	95.80%	100%	98,28%	95.80%	100%	74.00%	100%
21	Persentase Keluarga yang melaksanakan PHBS	75,67%	50%	73.54%	93.60%	38,73%	71%	69%	18,3%	95.80%	100%	83,02%	12.13%	89.70%	70.00%	84%
22	Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	100%	NA	NA	100%	0,64%	NA	100%	NA	NA	NA	40%	3.6%	100%	0.013%	-
23	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	100%	100%	83%	88.65%	98,26%	74%	6291 (99%)	72,9%	99.46%	30.1%	86,5%	68.26%	41.62%	7.80%	55,7

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA ESSENSIAL DAERAH TAHUN 2022																
24	Persentase Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	NA	100%	85%	85%	90%	100%	100%	87,70%	100%	28.57%	100%	86.83%	18.91%	48.49%	78,91
25	Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	NA	100%	0.24	100%	50%	0.018	90% (DPAP) 0,06% (Dinas Pangan)	NA	NA	NA	dilaksanakan hanya 6 orang kelompok x 20 orang=120 orang	100%	100%	0.0012%	-
26	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	87,07%	89,87%	45.19%	61.79%	3,58%	89.47%	91,17% (Dinkes), 74,91% (PUPR)	72,87%	91%	NA	80%	59.83%	100%	92.72%	84.25%
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	89,44%	110	21.576	2826	NA	279 SR	77% (Dinkes), 75,88% (PUPR)	76,38%	91%	NA	61,4%	52.49%	100%	20047 KK	70.79%
28	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	98,92%	100%	0	95%	100%	69.13%	100%	100%	94.05%	NA	penerima 9535	30.72%	NA	100.00%	100%
29	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	100%	NA	NA	100%	NA	20.57%	100%	NA	NA	NA	penerima 10672	NA	100%	NA	20%

### CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022 – PER KAB/KOTA DI SULAWESI UTARA

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
<b>CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022</b>																
1	Jumlah Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	2	8	3	2	2	2	5	3	1	1	5	10	2	3	9 kali
2	Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Rembuk Stunting	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA	33.30%	NA	100%	100%	1%	46%	100%
3	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	2 Kali	Ada
4	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	33.76%	20,716	97.19%	98.36%	NA	17.18%	98%	71,378 jiwa	7,693	NA	NA	48,249	NA	10,000	97.538 jiwa
5	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	YA	YA	YA	YA	NA	YA	NA	YA	YA	NA	YA	YA	YA	YA	1
6	Persentase pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting	100%	100%	NA	100%	NA	100%	NA	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kader Pembangunan Manusia di Desa/Kelurahan yang mendapatkan pembinaan/ bimbingan/pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	35%	100%	NA	100%	175.524	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	59,47%
8	Persentase Desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	100%	100%	75%	100%	NA	100%	NA	100%	100%	NA	70%	100%	100%	100%	84,07%



No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022																
9	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting	100%	100%	60%	100%	NA	56.70%	NA	100%	100%	NA	90%	49,7%	100%	100%	0,00%
10	Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	36.2	90%	100%	100%	100%	84,07%
11	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	2 Kali	2 Kali	NA	2 Kali	NA	2 Kali	2 Kali	NA	1 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	15 Kali	2 Kali	2 kali
12	Persentase Desa/kelurahan Bebas Stunting	80%	49,5%	81%	87.50%	12,41%	7%	82,70%	68%	0.6	NA	33,33%	52.69%	NA	75.30%	199 (73,3)%
13	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting	100%	100%	NA	90.40%	90%	32%	100%	100%	61.10%	100%	90%	100%	45.50%	100.00%	100%
14	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	NA	NA	2 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	Belum ada
15	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	98,9%	100%	100%	NA	85%	92.59%	100%	3,70%	18.75%	NA	100%	100%	100%	100.00%	7,4% (20 desa)
16	Persentase Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF)	63,4%	98%	100%	62.50%	90%	92.59%	100%	80,25%	89.50%	100%	63,27%	95.80%	100%	74.00%	100%
17	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas	NA	100%	NA	89.50%	85%	100%	100%	NA	100%	100%	90%	100%	100%	80.00%	82%
19	Terimplementasikannya sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Ya
20	Persentase posyandu yang memenuhi standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang	100%	100%	100%	82.70%	88%	100%	100%	100%	81.15%	97.1%	100%	100%	100%	73.40%	50%
21	Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) Stunting	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	100%
22	Persentase desa/kelurahan yang memiliki bidan	100%	100%	100%	79.38%	100%	38.27%	100%	35,80%	100%	NA	78%	53.89%	100%	100.00%	162 desa (60%)

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022																
23	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	10%	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50%	75%	100%	100.00%	
24	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	3,158
25	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	YA	
26	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	100%	73,83%	61%	6,067	100%	NA	NA	88,69%	15.28%	NA	100%	18.56%	PIK-R 33, BKR 17	11 PIK-R	12,419
27	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	31,33%	76%	100%	100%	80%	NA	100%	65,72%	39.58%	25%	100%	92.81%	27%	14.15%	1 BKR, 6 PIK
28	Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19)	14,54%	NA	22.9	15.2	146	NA	5605 (93%)	1,5%	6.21	100%	NA	7.41%	19	46.96%	2,9
29	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	0	66,3%	100%	5%	90%	0	3,74%	58,02%	0	NA	NA	143	100%	24.90%	3%
30	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	0	80%	100%	90%	70%	0	2%	30,86%	83.92%	NA	100%	100%	100%	37.80%	32%
31	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	2 Kanal	3 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	1 Kanal	3 Kanal	NA	NA	NA	3 Kanal	NA	3 Kanal	
32	Terlaksananya intervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting	1 Kali	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	NA	NA	NA	1 Kali	NA	NA	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Secara Mandiri
33	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	1359 Jiwa	3913 Jiwa	6206 KPM	7.563 (PKH) 11.127 (BLT DD)	7428 Jiwa	3579 Jiwa	14180 Jiwa	3848 Jiwa	NA	28 Jiwa	10670 Jiwa	3685 Jiwa	3373 Jiwa	10383 KPM	9.498 KPM

No	Data/Indikator	SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
CAPAIAN INDIKATOR DATA SUPPLY DAERAH TAHUN 2022																
34	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	2059 Jiwa	5459 Jiwa	6206 KPM	13.337 Jiwa	4878 Jiwa	478 Jiwa	16533 Jiwa	6464 jiwa	NA	NA	10670 Jiwa	9328 Jiwa	4301 Jiwa	19752 KPM	14.673 KPM
35	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	NA	16	NA	45	NA	13	40	18	27	NA	58	28	30	28	64 orang

#### **D. Intervensi**

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, upaya penurunan stunting tidak hanya dilakukan oleh urusan Kesehatan saja, tetapi diharapkan bisa dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan adanya sinergi dan kerja sama di berbagai sektor pemerintahan diharapkan bisa menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara.

Dalam rangka menurunkan stunting di Sulawesi Utara, pemerintah akan memperhatikan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- 3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
- 4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
- 6) Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pengobatan stunting jika anak sudah didiagnosa menderita stunting adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan terapi awal seperti memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi;
- 2) Memberikan suplemen tambahan berupa vitamin a, zinc, zat besi, kalsium dan yodium;
- 3) Memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal.

Sejalan dengan Arahana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang diimplementasikan ke daerah melalui Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 diarahkan untuk memantapkan pembangunan manusia di Sulawesi Utara antara lain melalui pencapaian target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Terdapat 5 Isu Strategis Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah saat ini, yaitu:

- 1) Komitmen, kelembagaan dan tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan dan pemerintah desa terkait program percepatan penurunan stunting, perlu diperkuat;
- 2) Jangkauan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku terhadap pola asuh anak dan balita serta pemberdayaan masyarakat perlu diperluas;
- 3) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas pada remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga beresiko dan bayi stunting perlu diintensifkan;
- 4) Pelaksanaan pengukuran, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran perlu dimantapkan;
- 5) Kerjasama dengan lembaga, badan usaha, serta non pemerintah terkait lainnya untuk berkolaborasi dalam program percepatan penurunan stunting perlu dioptimalkan;

Adapun berbagai strategi Percepatan Penurunan Stunting yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Satgas tingkat Provinsi;
- 2) Mengukuhkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) kepada Komandan Korem 131/Santiago;
- 3) Mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bunda Pendamping Keluarga kepada Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan;
- 4) Mengukuhkan Duta Cegah Stunting kepada Rio Dondokambey
- 5) Mengukuhkan Duta Generasi Berencana (Genre) kepada Remaja Berprestasi;
- 6) Mengkampanyekan Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak;

- 7) Mengedukasi Masyarakat melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) tentang Pemenuhan Gizi Seimbang dan Pola Asuh Anak dalam Keluarga;
- 8) Mendampingi Calon Pengantin, Keluarga Berisiko, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan dan Balita Stunting di tingkat Desa;
- 9) Melakukan Sosialisasi pemberian ASI Eksklusif dan Insiasi Menyusu Dini (IMD) kepada Ibu Hamil;
- 10) Memberikan Tablet Tambah Darah, Makanan Tambahan, Kapsul Vitamin A kepada Remaja Putri, Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Buruk;
- 11) Meningkatkan Peran Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga serta Pola Asuh Balita;
- 12) Menggelar Rembuk Stunting Tingkat Provinsi;
- 13) Menggelar Penilaian Kinerja Kab/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi; dan
- 14) Memberikan Penghargaan Percepatan Penurunan Stunting untuk Mengapresiasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

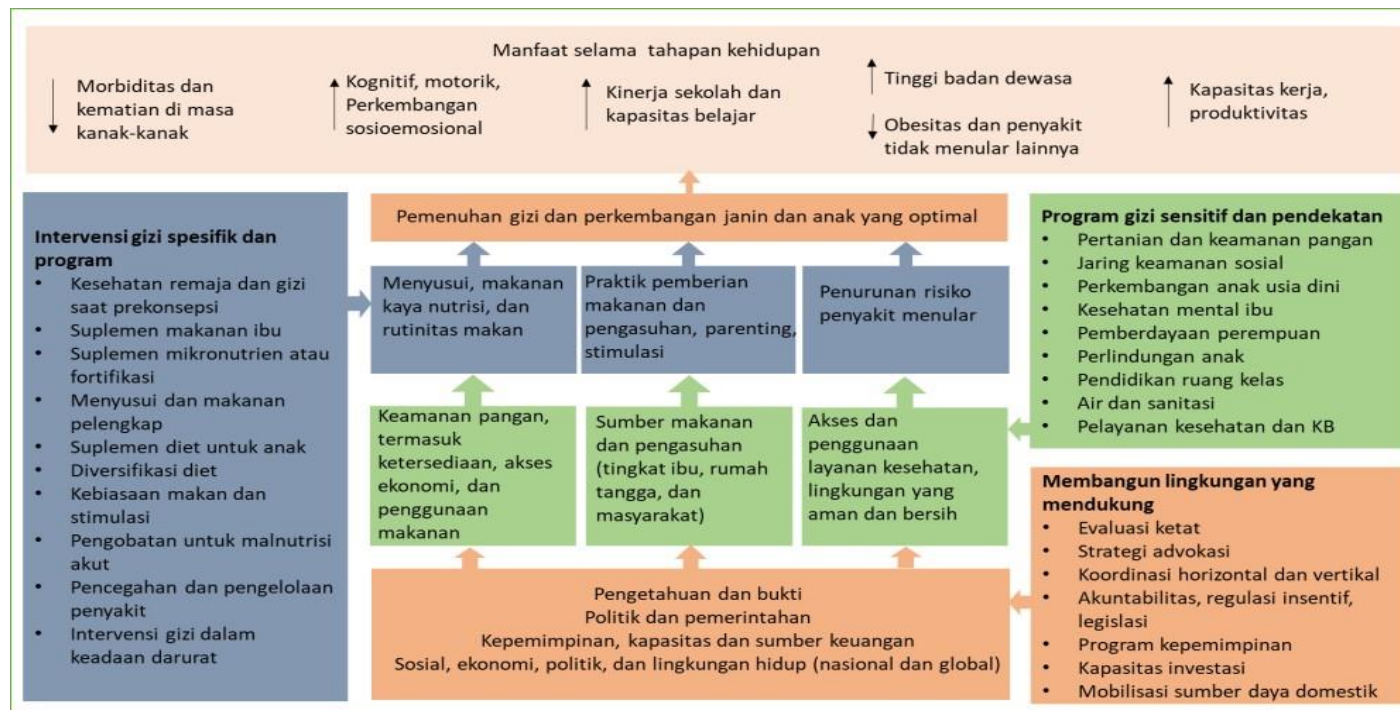
Dalam upaya pencapaian target percepatan penurunan stunting, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Percepatan Penurunan Stunting setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting.



## 1) Pendekatan Intervensi Gizi Terintegrasi

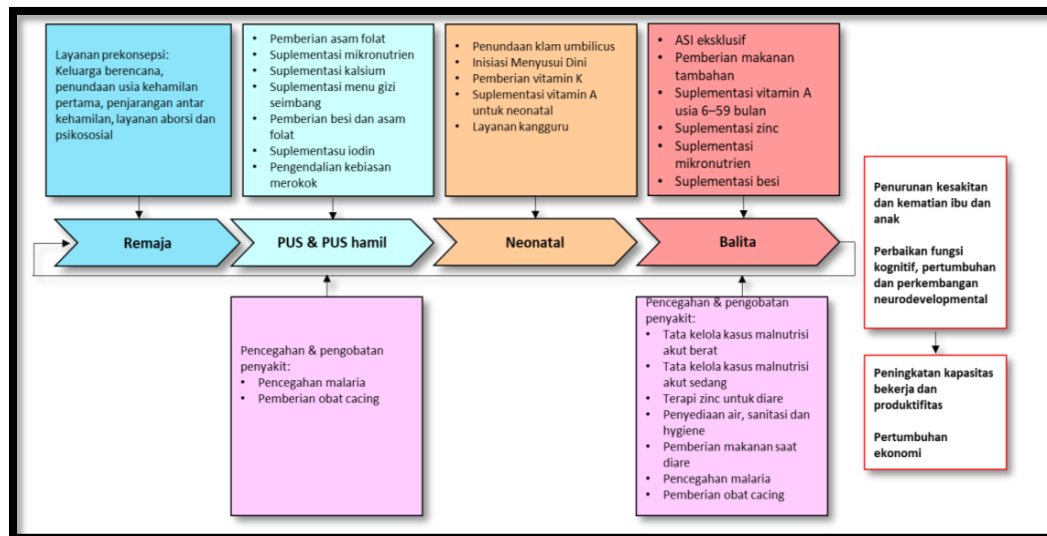
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.

### Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Penanggulangan Stunting

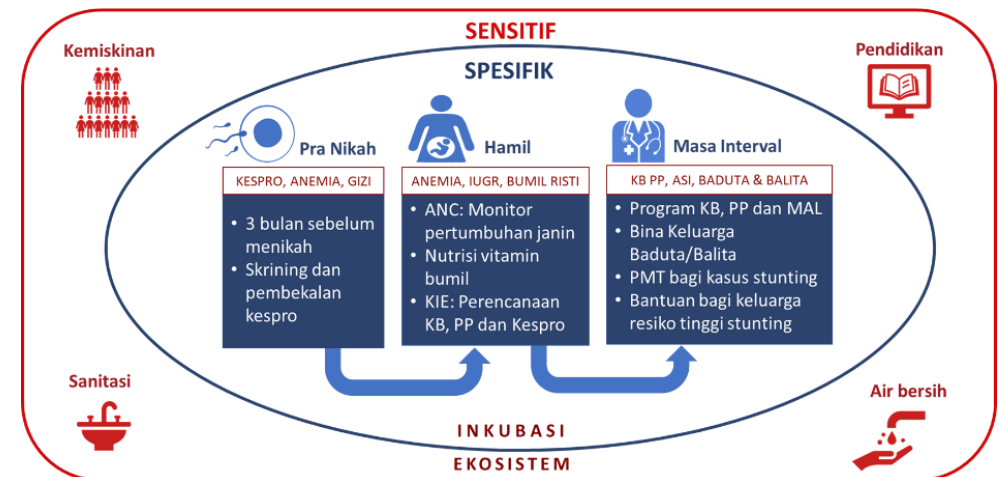


Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menyasar dari preconsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar dibawah menggambarkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan stunting dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.

### Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif berdasarkan Kelompok Sasaran



### Fokus Intervensi Gizi Terintegrasi



Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus stunting, dengan melakukan refocusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.



2) Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting sedikitnya melibatkan multisector dan multipihak.



Koordinasi dan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

### **3) Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko**

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi stunting yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan stunting sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting.

Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko stunting diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) penyediaan data keluarga berisiko stunting, 2) pendampingan keluarga berisiko stunting, 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4) surveilans keluarga berisiko stunting; dan 5) audit kasus stunting. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, penyediaan data/penapisan, pendampingan, surveilan, audit kasus serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagai rangkaian kegiatan bertahap yang utuh dan menyeluruh. Sebagai sebuah sistem, maka setiap tahapan intervensi saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Begitu juga sebagai sebuah tahapan yang sistematis, setiap tahapan harus dilakukan secara berurutan mulai dari penyediaan data, penapisan, pendampingan, surveilan dan audit kasus.

Data yang tersedia dalam rangka percepatan penurunan stunting harus akurat (reliable) dan sahih (valid), serta selalu terbaru (update), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor.

Pada umumnya saat ini pada masing-masing pemerintah daerah telah memiliki data terkait dengan stunting. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada lesson learned dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa bahwa data terkait dengan stunting bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting. Validasi data bisa dilakukan berorientasi daerah (local oriented) secara berjenjang dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Selanjutnya, dalam merespon target percepatan penurunan stunting serta periode pencegahan dan penanganan stunting yang sangat pendek, maka seluruh kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam percepatan penurunan stunting harus didasarkan pada intervensi yang tepat waktu (*timeliness of services*), tuntas (*seamlessness*), koordinasi (*co-ordination*), kemudahan akses (*easy access*), dan intervensi yang disesuaikan dengan keadaan individu/keluarga beresiko (*service tailored for individual circumstances*). Dengan tuntutan tersebut dalam percepatan penurunan stunting menekankan budaya pelaksanaan intervensi yang fokus pada penyelesaian permasalahan, serta pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah pada kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko stunting.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan pendampingan keluarga berisiko stunting secara total dan masif (*terintegrasi, terpadu dan manjangkau seluruh keluarga berisiko stunting*) serta audit kasus stunting. Dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, dilakukan asesmen yang komprehensif terhadap keluarga calon penerima intervensi spesifik maupun intervensi sensitif melalui kegiatan pendataan dan penapisan. Selain itu, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian intervensi. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan intervensi mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa intervensi yang didasarkan pada prinsip besaran resiko yang disandang penerima intervensi.

Untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi percepatan penurunan stunting terutama kualitas keterpaduan program dan kegiatan operasional di lini lapangan maka dilakukan:

1) Penguatan Peran Tim Penggerak PKK

Tim Penggerak PKK mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan sejak dulu telah menjadi mitra pemerintah yang sangat aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan, mulai dari kesehatan, gizi, KB, sampai masalah lingkungan. Dengan bekal pengalaman yang sangat panjang tersebut, maka TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan akan menempati “peran sentral” dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting. Dengan demikian, TP. PKK di lapangan menjadi motor penggerak dalam Tim Pendamping Keluarga bagi keluarga berisiko stunting yang lebih difokuskan kepada masa inkubasi.

2) Penguatan Peran Bidan

Pemahaman, pengalaman serta ketersediaan bidan dalam penanganan masalah stunting merupakan aset dan modal besar dalam pendampingan keluarga berisiko. Tugas keseharian bidan dalam proses perawatan masa kehamilan, kelahiran serta pasca persalinan merupakan pertimbangan khusus dalam penguatan peran bidan. Itulah sebabnya keberadaan bidan di desa memainkan “peran sentral” khususnya dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting.

3) Penguatan Peran Kader

Percepatan penurunan stunting harus diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang masif dengan arahan yang jelas, maka untuk meningkatkan modal sosial dan prakarsa masyarakat, kader di desa baik itu kader kesehatan, kader keluarga berencana, kader pembangunan manusia, harus dikapitalisasi untuk turut serta dalam skema pendampingan keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari tim pendamping keluarga.

#### 4) Penguatan Sistem Deteksi Dini

Selain memperkuat pendampingan keluarga berisiko, sistem deteksi dini dan pencegahan keluarga berisiko juga mutlak diperlukan dengan memperkuat regulasi pendaftaran calon pengantin (Catin) minimal 3 bulan sebelum menikah (Pra Nikah), dimana waktu tiga bulan ini merupakan waktu minimal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehamilan pada pasangan baru (hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% pasangan usia subur baru akan mengalami kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi) agar tidak terjadi resiko stunting sekaligus sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan awal dimulainya pendampingan terhadap keluarga berisiko.

Penguatan tiga aktor serta deteksi dini tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendampingan keluarga berisiko stunting. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun maka paling sedikit secara nasional akan dibentuk 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan demikian satu desa/kelurahan minimal membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari 3 petugas, dari unsur Bidan, PKK dan Kader yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan. Aksi pendampingan dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko stunting terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial. Pendampingan oleh tim pendamping keluarga dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi perubahan perilaku, fasilitasi pelayanan dan rujukan kesehatan pencegahan stunting, fasilitasi untuk memperoleh akses terhadap sanitasi dan air bersih serta fasilitasi terhadap akses penerimaan program bantuan sosial dan kesehatan.

Adapun berdasarkan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Tahun 2023 terkait penyajian dukungan sarpras, SDM dan data landas daerah, yang telah dipaparkan oleh pemerintah kab/kota, di Sulawesi Utara dapat dilihat pada table berikut:

**DUKUNGAN SARPRAS, SDM DAN DATA LANDAS DAERAH TERKAIT PENANGANAN STUNTING PER-KAB/KOTA TAHUN 2022**

INDIKATOR/KAB/KOTA		SITARO	BOLMUT	TOMOHON	MINUT	TALAUD	BOLTIM	MANADO	BOLSEL	MITRA	BITUNG	MINSEL	SANGIHE	KOTAMOBAGU	BOLMONG	MINAHASA
1	Jumlah Puskesmas	13	12	7	11	21	8	16	9	13	9	17	17	5	18	23
2	Jumlah Posyandu	128	112	44	151	153	81	341	83	144	142	17	186	41	218	287
3	Jumlah Bidan	128	139	64	222	144	86	438	145	95	89	-	90	99	284	164
4	Jumlah Ahli Gizi	17	33	13	44	41	16	30	21	21	30	-	26	17	43	9
5	Jumlah Tim Pendamping Keluarga	279	321	77 TIM	519	153	243	348 Kelompok (144.000 orang)	243	432	522 Orang	546	502	96	202 tim	810
6	Jumlah Kader Pembangunan Manusia di Desa/Kelurahan	83	106	134	125	153	81	175,524	81	144	355 Orang	167	145	33	200 KPM	227
7	Jumlah Guru PAUD	230	553 PNS, 52 GTT	223	206	563	387	534	336 Guru	351	241 Orang	262	239	272	401	ASN 144 & Non ASN 682
8	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	7301	5163	3,065	3,261	9899	11,139	13,223	5455	1362	7.814	4484	5836	12224	9229	12,419
9	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	204	107	19	45	23	13	40	18	30	28	58	28	34	28	64 orang
10	Jumlah Balita Stunting	22	115	13 ANAK STUNTING	313	430	385	95	281	122	289	391	278	189	104	136
11	Jumlah Remaja Putri	3096	1824	5189	7,916	6821	3049	23069	3266	7285	19568	-	4943	-	6359	5,852
12	Jumlah Calon Pengantin/Calon Ibu	0	414	12,301	607	NA	353	2406	433	192	486	-	310	42 per des 2022	1316	507
13	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	11090	13187	12,477	36,100	12,273	12,419	37718	11431	22,991	12450	8607	18149	1545	34140 PUS	40,836
14	Jumlah Ibu Hamil	1000	1387	1560	3,687	1338	1206	6636	1468	2446	4498	342	1764	1600	4125	5,332
15	Jumlah Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	158	24	68	460	109	140	834	296	173	442	-	58	125	581	376
16	Jumlah Bayi usia kurang dari 6 bulan	871	306	2340	3,021	576	480	2060	340	699	1100	-	663	711	1666	10,541
17	Jumlah Anak usia 6-23 bulan	1040	1514	0	4,750	1384	1644	6046	2401	5895	2942	-	1867	2086	3980	5,550
18	Jumlah Anak berusia di bawah lima tahun (balita)	3646	5208	4022	12,155	5842	5992	20799	5431	6594	18.201	-	6657	4964	12707	19,641
19	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	319	100%	3,655	7,563	4902	2,449	8726	3848	0	5378	9535	54.5	33.73	10.383	9.498 KPM
20	Jumlah PAUD	123	181	66	36	225	117	252	103	172	116	220	213	81	264	299



Pendampingan keluarga berisiko stunting dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi stunting (titik-titik krusial penyebab/terjadinya stunting), dengan fokus pelaksanaan pendampingan pada periode tersebut diharapkan seluruh faktor resiko penyebab stunting bisa teratasi dan berdampak pada penurunan kejadian stunting. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin/pra nikah/calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan dan masa interval serta baduta dan balita meliputi:

a) Pemeriksaan Kesehatan dan Advokasi KIE Cegah Stunting 3 Bulan Pra Nikah.

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan pemeriksaan dan screening mandiri kesehatan (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan dan kadar hemoglobin darah) 3 bulan sebelum pernikahan secara daring melalui aplikasi



pendampingan pra-nikah yang akan diunduh pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemeriksaan dan screening mandiri tersebut akan memberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai salah satu syarat pernikahan). Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi tablet tambah darah (TTD). Begitu juga bagi mereka yang kekurangan gizi harus difasilitasi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang.

Selain perbaikan status kesehatan, advokasi dan KIE pencegahan stunting dan keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian stunting. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon pengantin.

b) Pendampingan dan KIE terhadap Ibu hamil

Periode kehamilan merupakan periode kritis kedua yang menentukan terjadinya kasus stunting, oleh karenanya seluruh ibu hamil akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada seluruh periode kehamilannya. Dalam periode kehamilannya Ibu hamil akan memperoleh beberapa assessment (penapisan) untuk memperoleh profil kesehatannya dan menentukan intervensi yang harus dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik selama periode kehamilannya. Dengan demikian, seluruh ibu hamil terfasilitasi kebutuhan kesehatannya, gizinya, pengetahuan tentang stunting, maupun aspek mental dan psikologisnya.

c) Program KB Pascapersalinan

Pada masa pascapersalinan dan interval, perlu segera dilakukan program KB Pascapersalinan. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya stunting.

d) Pendampingan Masa Baduta dan Balita

Pendampingan pada masa baduta dan balita akan difokuskan pada memantau tumbuh kembang anak, fasilitasi akses imunisasi dasar lengkap, serta bantuan sosial bagi keluarga dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki

kasus stunting. Disamping itu dilakukan advokasi dan KIE kelompok maupun interpersonal tentang tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif untuk anak pada 6 bulan awal dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan seimbang serta kebersihan lingkungan.

e) Fasilitasi Akses Terhadap Bantuan Sosial

Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko stunting pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga risiko stunting juga dalam kerangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko stunting.

f) Fasilitasi Akses Terhadap Lingkungan dan Rumah Sehat

Kondisi lingkungan yang tidak sehat serta ketiadaan air bersih serta sarana sanitasi sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong terjadinya kasus stunting juga harus mendapat perhatian dalam kerangka pendampingan keluarga. Sehingga fasilitasi akses terhadap bantuan rumah sehat, sanitasi dan air bersih juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga.

g) Pelaksanaan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal di Desa prioritas Percepatan Penurunan Stunting

Keberadaan dapur gizi keluarga khususnya di desa-desa prioritas diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang bagi keluarga berisiko stunting di wilayah sekitarnya. Untuk terselenggaranya dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilakukan melalui dukungan warga sekitar dengan cara iuran atau gotong royong, bantuan pemerintah, atau pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau perusahaan melalui CSR atau bantuan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilaksanakan di rumah kepala desa, atau ketua RW oleh TP. PKK Desa/RW beserta Tim Pendamping Keluarga.

#### E. Audit Kasus Stunting

Audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya, khususnya sebagai penapisan kasus-kasus yang sulit termasuk mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita. Aksi audit kasus stunting dilakukan dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan medical problem (permasalahan medis) terkait kasus stunting. Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga audit stunting dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/kelurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui "rembuk stunting". Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui rembuk stunting di kabupaten/kota. Sedangkan berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.

Dalam setiap tahap audit kasus yang menyangkut sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga, audit stunting dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan keilmuan (Bidan Desa, PKB, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dokter dan Kepala Puskesmas, Perawat, Ahli gizi, Dokter Sp.A, Kepala Dinas terkait di tingkat kab/kota). Dengan demikian, diharapkan berbagai masalah dapat diselesaikan secara komprehensif pada setiap tahapan.

Sedangkan dalam pemecahan masalah terkait medical problem (permasalahan medis) lebih difokuskan kepada kejadian-kejadian luar biasa, pemeriksaan holistik kasus stunting (dengan asumsi bahwa pendampingan sudah dilaksanakan, namun kasus stunting tetap terjadi) sehingga ditemukan referensi dan inovasi pemecahan masalah untuk perbaikan pola penanganan kasus Stunting ke depan. Pelaksanaan audit kasus stunting yang berhubungan dengan medical problem dilakukan satu tahun sekali oleh tim panel ahli audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota.

#### F. Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024, bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Utara, maka Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan Penilaian Kinerja bagi Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menilai aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan di setiap kabupaten dan kota;
- 2) Untuk mengetahui hal inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
- 3) Untuk memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi; dan
- 4) Untuk mengapresiasi kinerja kabupaten/kota atas upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi utara.

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

ttd

**OLLY DONDOKAMBEY**